

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
DISPARITAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2001-2014**

Skripsi

Oleh

Putri Puspita Sari



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

ANALYSIS OF FISCAL DECENTRALIZATION EFFECT ON INCOME DISPARITY IN LAMPUNG DURING THE PERIOD 2001-2014

By

Putri Puspita Sari

Fiscal decentralization gives more advantages for regions to manage their own fiscal capacities. Regions governments have opportunity to increase economic efficiency because governments have informational advantages concerning resource allocation. The governments are in better position to provide the kind of public goods and services that closely meets the local needs.

This research aims to analyze the impact of the implementation of fiscal decentralization on income disparities in 10 regencies/cities in Lampung Province for a Four Ten-year implementation period, since 2001-2014 The variables used as proxies of fiscal decentralization are: PAD and Fund Balance. The analysis concluded that PAD is positive effect and significant to income disparity in 10 regencies/cities in Lampung Province, on the contrary that fund balance is negative effect and significant to income disparity in 10 regencies/cities in Lampung Province

Keywords: fiscal decentralization, Lampung, panel data, regional income disparity

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2001-2014

Oleh

Putri Puspita Sari

Desentralisasi fiskal memberikan banyak keuntungan bagi daerah untuk mengatur sendiri kapasitas fiskalnya. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk meningkatkan perekonomiannya secara efisien karena pemerintah telah memberikan pengetahuan bermanfaat dalam pengalokasian sumberdaya yang ada. Pemerintah dapat dengan baik menyediakan barang public dan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan pada 10 kabupaten/kota di Propinsi Lampung selama empat belas tahun periode pelaksanaan, yaitu dari tahun 2001-2014. Variabel yang digunakan sebagai proxy dari desentralisasi fiskal adalah: PAD dan Dana Perimbangan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan pada 10 kabupaten/kota di Propinsi Lampung . Sebaliknya Dana Perimbangan berpengaruh negative dan signifikan terhadap disparitas pendapatan pada 10 kabupaten/kota di Propinsi Lampung .

Kata kunci: data panel, desentralisasi fiskal, disparitas pendapatan, Lampung

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN PROVINSI
LAMPUNG
TAHUN 2001-2014**

Oleh

Putri Puspita Sari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

**ANALISIS PENGARUH
DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
DISPARITAS PENDAPATAN PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2001-2014**

Nama Mahasiswa

Putri Puspita Sari

Nomor Pokok Mahasiswa

1211021093

Jurusan

Ekonomi Pembangunan

Fakultas

Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si
NIP 196112091988031003

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

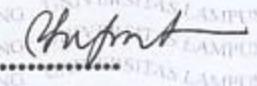
Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP 196606211990031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si



Penguji

Bukan Pembimbing : Dedy Yuliawan, S.E., M.Si



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si

NIP. 1961 0904 198703 1011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juni 2016

PERYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Bandar Lampung, 29 Juni 2016

Penulis



Putri Puspita Sari

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lampung Timur, pada tanggal 11 Januari 1994, sebagai anak ke tiga dari tiga bersaudara, dari Bapak Suradi Yanto dan Ibu Surati.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Labuhan Ratu Satu, Lampung Timur pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Way Jepara pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Way Jepara pada tahun 2012.

Tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur PMPAP. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Direktorat Jendral Anggaran, Otoritas Jas keuangan dan Kementrian Keuangan sebagai pengganti UAS mata kuliah Ekonomi Publik II, Bank dan Lembaga Keuangan dan Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2015 selama 40 hari di Desa Tri Tunggal Jaya , Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil' alamin, ku persembahkan karya ini kepada :

*Allah Subhanawata'ala. Tiada kata yang mampu ku ucap untuk
mensyukuri nikmat yang Engkau beri pada hamba-Mu ini.*

*Kedua orang tuaku tercinta yang luar biasa besar jasanya bagi hidupku,
tanpa kasih sayang, do'a dan perjuangan Bapak sama Mamak aku mungkin
tidak dapat menjadi seperti saat ini, Terima kasih Bapak sama Mamak yang
selalu mendidik dan memperjuangkanku, di setiap waktu dalam sujudmu
kau selalu menyebut namaku. Bapak sama Mamak tersayang terima kasih
banyak atas segala pemberianmu yang engkau berikan. Untuk kakak dan
keponakanku tersayang terima kasih atas segala dukungan, baik inspirasi,
motivasi, untuk kehidupanku. Untuk yang terkasih terima kasih untuk
delapan tahun ini, semoga apa yang kita cita-citakan terwujud.*

*Sahabat- sahabatku yang selalu memotivasi dan memberi kenangan terindah
dalam hidupku dan terima kasih Universitas Lampung berkat program
beasiswa PMPAP ini aku bisa menyelesaikan studi di almamater
kebanggaanku Universitas Lampung.*

MOTTO

“Wallahu ma’as shoobiriin”

Dan Allah menyertai orang-orang yang sabar

(Q.S Al Anfal: 65)

*Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah
dilaksanakan/diperbuatnya.*

(Ali Bin Abi Thalib)

Jangan pernah berkata tidak bisa sebelum mencoba

(Putri Puspita Sari)

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2001-2014”** adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu Ilmu Ekonomi di Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Bimbingan, keteladanan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh penulis mempermudah proses pembelajaran tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pelajaran, motivasi dan bimbingan yang sangat berharga bagi Penulis.
5. Bapak Dedy Yuliawan, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat untuk Penulis.
6. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, nasehat, bimbingan untuk perkembangan studi ku di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
7. Segenap dosen pengajar atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, dan para karyawan yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis selama kuliah.
8. Keluargaku tercinta, Mamak merupakan sosok luar biasa yang sangat memotivasi hidupku, memberikan segalanya yang kau punya hanya untukku. dan Bapak engkau adalah pejuang sejati yang tanpa lelah berjuang untuk keluarganya, yang percaya bahwa anaknya mampu meraih segalanya. terima kasih untuk semua kasih sayang yang mamak dan bapak berikan kepadaku. Semoga ini merupakan awal bagi anakmu ini untuk bisa membahagiakan mamak dan bapak lebih dari sekarang. Sekali lagi terimakasih pak, mak.
9. Mamasku Dedi Sarwoko, terima kasih sudah mengajarkan aku membaca, dulu sewaktu aku kecil, semoga kita dapat bertemu lagi di surga-Nya. Mamasku Yaulin Purnomo terimakasih telah memberikan waktunya untuk selalu bisa mengantarku kemana-mana untuk mengurus segala yang aku butuhkan untuk

menunjang perkuliahanku, terima kasih untuk mbak ipar ku Pujiati telah melahirkan keponakan tercerdas dan tercantik Yara Afraha yang membuatku selalu rindu ingin pulang kerumah. Terimakasih untuk segalanya.

10. Sahabat – sahabatku tercinta yang selalu menginspirasi dan mendorong ke perubahan positif, Siti dan Sunarti (wanita- wanita terbaik yang pernah aku kenal dan selalu ada), Arifa (wanita yang selalu bisa memberikan jalan keluar), Dewi (teman yang baik hati dan selalu ingin dibilang cantik), Agus (wanita yang paling bisa membuatku tertawa dengan caranya), Puspa (wanita terikhlas yang aku kenal alias nggak tegaan), Terima kasih atas kebersamaan dalam canda maupun dukanya, semoga kita dipertemukan di surganya kelak. Amin.
11. Keluarga kos Indephis, buat Bapak dan Ibu Kos, Mbak Lia (wanita berkalung sarung), Mbak Asri (tempat curhat terbaik no 2), Mbak Yeni (wanita dengan kelemahan lembutannya), Mbak Fitri (penyuka anime), Azis (teman terbaper yang pernah ada) , Dewa Ayu (teman yang pintar bahasa inggris), Oki (adik tingkat yang super heboh). Terimakasih untuk semua dukungannya, sukses untuk kita semua. Amiiinn.
12. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2012, Dwi sarasati (teman terbaik yang selalu meminjamkan uangnya untukku), Yani, Uwil, Yoka, Emia, Yuli, Suda, Richa, Budi, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman- Teman dari bangku SMA sampai bangku kuliah Intan Larasati (wanita penuh kreasi), Wayan Krisma Angga Pratama (Laki-laki penggila badminton dan drama K) Terimakasih untuk semua dukungan, doa dan kebersamaan, terima kasih untuk semua kegilaannya, semoga kita bisa sukses bersama.

14. Saudara serumah selama 40 hari di Tri Tunggal Jaya (Tulang Bawang), Gusti Aji Wijianto, S.Pt selaku mantan kordes, Bonifa Refsi, S.H selaku mantan wakil kordes, Ana Triatun Amalyah, S.A.N mantan sekertaris dan Haryanti (wanita penuh ide dan kreasinya) Terimakasih atas dukungannya, sukses untuk kita semua dan semoga silaturahmi tetap terjaga.
15. Untuk kamu, Heru Santoso, sesosok lelaki yang dapat memberi semangat dan motivasi setiap hariku. Terima kasih sudah ada selama 8 tahun ini untuk mendengar segala permasalahan yang mungkin tak dapat aku katakan kepada orang tua ataupun orang lain. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai tahun depan. Amin

Semoga Allah memberikan senantiasa memberikan kasih sayang dan perlindungannya kepada kita semua. Akhir kata, penulis memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Semoga bermanfaat.

Bandar Lampung, 29 Juli 2016

Penulis,

Putri Puspita Sari

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Penelitian	15
F. Hipotesis Penelitian.....	16
G. Sistematika Penelitian.....	17

II.TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Desentralisasi Fiskal	18
B. Perkembangan Teori Desentralisasi Fiskal.....	21
1. Teori Desentralisasi Fiskal Tradisional	21
a. Model Desentralisasi Tiebout.....	22
b. Teorema Desentralisasi Oates	23
2. Teori Desentralisasi Fiskal Baru	25
C. Desentralisasi Fiskal di Indonesia.....	32
D. Ketimpangan (<i>Disparity</i>) antar Daerah	35
1. Definisi Ketimpangan (<i>Disparity</i>).....	35
2. Teori Ketimpangan (<i>Disparity</i>)	36
3. Pengukuran Ketimpangan (<i>Disparity</i>).....	38
a. Indeks Williamson	38
b. Indeks Entropi Theil	38
c. Indeks Jaime Bonet	39
E. Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan	40
F. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Disparitas Pendapatan	43

G. Hubungan Dana Perimbangan dengan Disparitas Pendapatan.....	44
H. Tinjauan Empiris	45

III. METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data	48
B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	48
C. Definisi Operasional Variabel	49
D. Metode Penelitian	50
E. Model Analisis	51
1. Model Analisis Ketimpangan (<i>Disparity</i>) Antar Daerah	51
2. Model Analisis Ekonometrika	51
F. Prosedur Analisis.....	52
1. Analisis Model Regresi	52
a. <i>Pooled Least Square (PLS)/Common Effect Model (CEM)</i>	52
b. <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	52
c. <i>Random Effect Model (REM)</i>	53
2. Pemilihan Model Data Panel	53
a. <i>F - Test</i>	53
b. <i>Hausman Test</i>	54
c. <i>The Breusch – Pagan Test</i>	54
3. Uji Hipotesis	55
a. Uji F (Uji Signifikansi Simultan)	55
b. Uji t (Uji Signifikansi Individual).....	56
c. Uji Goodness of Fit (R_2).....	56

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	57
1. Provinsi Lampung	57
2. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung.....	58
3. Perkembangan dan Struktur Ekonomi.....	59
B. Analisis Disparitas Pendapatan.....	60
C. Analisis Model Regresi.....	62
D. Pemilihan Metode Data Panel	62
1. <i>F – Test (Pooled Least Square vs Fixed Effect)</i>	62
2. <i>The Hausman Test(Fixed Effect vs Random Effect)</i>	65
E. <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	66
F. Analisis Intersep Model <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	67
G. Uji Hipotesis	71
1. Uji F (Uji Signifikansi Simultan)	71
2. Uji t (Uji Signifikansi Individual)	71

3. Uji <i>Goodness of Fit</i> (R_2)	72
H. Intepretasi Hasil Analisis.....	73
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Disparitas Pendapatan	73
2. Pengaruh Dana Perimbangan (DAPER) terhadap Disparitas Pendapatan	74

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Perkembangan Dana Perimbangan Di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2001-2004	8
2	Perkembangan Dana Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 1995/1996-1999/2000.....	9
3	Tinjaun Empiris.....	45
4	Hasil Estimasi Menggunakan Metode <i>Common-Constant</i>	62
5	Hasil Uji Model Menggunakan <i>Hausmant Test</i>	65
6	Hasil Estimasi <i>Fixed Effect model (FEM)</i>	66
7	Nilai Koefisien <i>Fixed Effect model (FEM)</i>	67
8	Uji Signifikansi t ($\alpha=0.05$)	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2001-2014.....	7
2	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 1996-2000	10
3	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2001-2014	11
4	Rata-rata Pertumbuhan Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung Tahun 2001-2014	12
5	Kerangka Pemikiran.....	15
6	Jumlah Penduduk 10 kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2001-2014	58
7	Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2001-2014	59
8	Nilai Indeks Bonet kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2001-2014	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1	Pendapatan Perkapita Tahun 2000 Kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2000-2014 (Dalam Jutaan Rupiah)..... L-2
2	Indeks Jaime Bonet Antar Kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2001-2014 L-3
3	Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/kota Di Provinsi Lampung Tahun 2001-2014 (Dalam Juta Rupiah) L-4
4	Data Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2001-2014 (Dalam Juta Rupiah) L-8
5	Data Input Regresi.....L-12
6	Hasil Regresi Dengan Menggunakan <i>Common Effect Model (CEM)</i> ... L-13
7	Hasil Regresi Dengan Menggunakan <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>L-14
8	Hasil Regresi Dengan Menggunakan <i>Random Effect Model (REM)</i>L-15
9	Uji <i>Hausmant Test</i>L-16

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya, pembangunan ekonomi sering kali tidak merata dan menimbulkan ketimpangan (*disparity*) antar daerah. Adanya perbedaan tingkat pembangunan dan pendapatan di berbagai daerah dapat disebabkan karena adanya perbedaan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, diantaranya latar belakang geografis, potensi sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, infrastruktur, dan sebagainya. Perbedaan tersebut menyebabkan ketimpangan antar daerah yang satu dan daerah yang lain. Perbedaan tingkat pendapatan ini membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan wilayah antar daerah semakin besar. Maka dari itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi (Sasana,Hadi, 2009).

Ketimpangan antar daerah akan terus terjadi bahkan meningkat apabila tidak adanya implikasi atau kebijakan dari pemerintah dalam menurunkan ketimpangan tersebut, baik dari sisi fiskal maupun distribusi pendapatan. Menurut Nazara (2007) disparitas antar daerah adalah masalah struktural di perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan campur tangan pemerintah dalam memecahkan permasalahan struktural perekonomian, salah satunya adalah dengan merancang kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia.

Kebijakan Otonomi daerah lahir melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang ini kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan melalui desentralisasi.

Desentralisasi menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan

pemerintah pusat, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003). Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002). Otonomi daerah tidak hanya berhenti pada pembagian dana pembangunan yang relatif “adil” antara pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan (*balancing fund*), tetapi keberhasilan otonomi daerah juga diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh sebab itu, implementasi otonomi daerah tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemerintah daerah, yakni Bupati atau Walikota serta perangkat daerah lainnya, tetapi juga seluruh masyarakat lokal di tiap-tiap daerah (Saragih, 2003;30).

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui

UU No. 33 Tahun 2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut (Sianturi, 2011). Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sumber-sumber penerimaan daerah ini memberikan kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya yaitu dengan meluaskan jangkauan dari bagian pajak dan bagi hasil Sumber Daya Alam dengan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah.

Penelitian Dilinger (1994) tentang pelaksanaan desentralisasi di beberapa Negara menemukan bahwa pemicu dilakukannya kebijakan desentralisasi fiskal adalah keinginan untuk memperoleh layanan publik yang lebih baik. Kemudian, menurut Mardiasmo (2009) desentralisasi diharapkan dapat menghasilkan dua manfaat.

Pertama. Yaitu mendorong peningkatan partisipasi, parkarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Manfaat yang kedua yaitu memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pemberian peran pengambil keputusan public ketingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

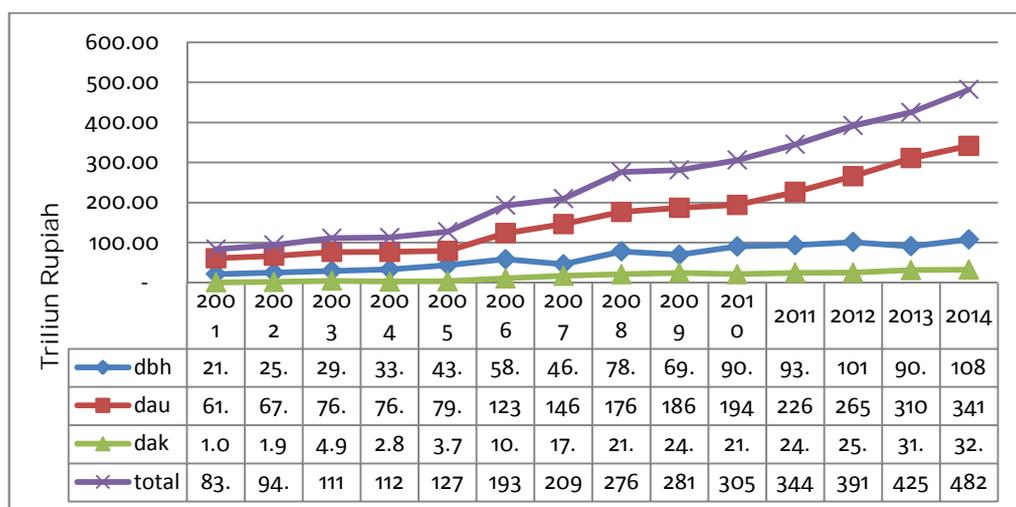
Sejalan dengan Gil, Pascud, dan Rapun (2002) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat berkontribusi terhadap pengurangan disparitas antar daerah. Pemerintah daerah dapat mengelola informasi dan sumber daya daerah dengan lebih efisien. Desentralisasi juga minimbulkan persaingan antar daerah untuk terus menggali potensi daerah masing-masing sehingga memicu peningkatan pendapatan daerah.

Namun, disisi lain menurut Sacchi dan Salotti (2011) menyatakan sebaliknya, mereka menyatakan bahwa desentralisasi berkontribusi terhadap meningkatnya disparitas antar daerah. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya daerah mampu mengelola atau menggali potensi daerah tersebut yang mengakibatkan penerimaan pajak didaerah berbeda dengan daerah lain yang lebih tinggi pendapatan asli daerahnya. Menurut Prud'homme (1995) daerah-daerah yang lebih kaya akan memiliki *tax bases* yang lebih besar, dan oleh karenanya akan mampu untuk mengumpulkan pajak yang lebih banyak. Dengan penghasilan pajak yang lebih besar maka daerah-daerah tersebut akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dibandingkan daerah lain yang lebih miskin. Hal

ini mengakibatkan dunia usaha maupun rumah tangga lebih menyukai untuk berada di daerah-daerah tersebut yang mengakibatkan *tax base* yang telah ada menjadi lebih besar lagi daripada sebelumnya. Dengan kondisi demikian maka akan terjadi disparitas pendapatan antar daerah.

Dari berbagai pendapat tadi, terlihat bahwa terdapat 2 kutub pandangan mengenai pengaruh desentralisasi terhadap disparitas pendapatan regional. Pandangan pertama menyatakan bahwa desentralisasi akan mampu mengurangi disparitas tersebut. Namun pandangan lain menyatakan bahwa desentralisasi justru akan meningkatkan disparitas pendapatan antar wilayah, di mana daerah-daerah dengan berbagai keuntungan sosial ekonomi akan diuntungkan dengan adanya desentralisasi fiskal sementara daerah-daerah lainnya hanya memperoleh sedikit manfaat atau malah justru dirugikan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sendiri ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, djk.go.id
Gambar 1 Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2001-2014

Berdasarkan gambar 1 diatas terlihat bahwa pada awal desentralisasi fiskal transfer ke daerah berupa Dana Perimbangan hanya sebesar Rp. 83,74 triliun pada tahun 2001 dan meningkat sampai menjadi Rp. 482,19 triliun pada tahun 2014.

Sementara itu untuk porsi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing pada tahun 2001 sebesar Rp. 21,69 triliun, Rp. 61,04 triliun dan Rp. 1,02 triliun meningkat menjadi Rp.108,04 triliun, Rp. 341,25 triliun dan Rp. 32,90 triliun pada tahun 2014.

Mengingat besarnya dukungan pendanaan untuk menjalankan kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah tersebut, maka selaras dengan hakikat desentralisasi, besarnya sumber pendanaan untuk daerah tersebut harus dibarengi dengan tindakan yang tepat untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akan lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (kepentingan publik), sehingga diharapkan *local government spending* tersebut akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun harapan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan, hal ini antara lain terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi regional, dimana setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal pertumbuhan PDRB menunjukkan variasi antar daerah yang masih relatif tinggi. Hal tersebut

memperlihatkan indikasi awal bahwa implementasi desentralisasi fiskal memberikan dampak yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Mengikuti fenomena yang terjadi secara nasional, implementasi desentralisasi di Provinsi Lampung juga ditandai dengan peningkatan dana perimbangan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Perkembangan Dana Perimbangan di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2001-2014 (dalam juta rupiah)

Tahun	Dana Perimbangan	DBH	DAU	DAK
2001	292,746	103,322	188,303	1,121
2002	365,136	121,074	241,110	2,952
2003	400,449	132,383	263,466	4,600
2004	446,619	155,953	286,822	3,844
2005	540,013	185,410	350,835	3,768
2006	673,620	202,069	460,898	10,653
2007	715,963	189,129	509,656	17,178
2008	817,633	224,371	570,534	22,728
2009	839,026	170,505	628,506	40,016
2010	951,157	210,804	699,239	41,113
2011	1,063,287	251,104	769,973	42,210
2012	1,280,852	310,625	939,139	31,088
2013	1,421,738	300,966	1,060,663	60,108
2014	1,471,956	287,051	1,136,053	48,852

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, *djpk.go.id*

Dari tabel 1 di atas, terlihat bahwa dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung meningkat dari Rp 292.746 Milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 1,471 triliun pada tahun 2014. Jumlah tersebut meningkat secara drastis bila dibandingkan dengan era sebelum desentralisasi fiskal, dimana dana pemerintah pusat yang diterima oleh pemda di wilayah Provinsi Lampung dalam bentuk Dana Bagi Hasil, Sumbangan/Subsidi Daerah Otonomi, dan Bantuan Pembangunan dalam 5 tahun terakhir sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal rata-rata hanya sebesar Rp. 620,678 milyar pertahun. sebagaimana terlihat pada Tabel 2 ,berikut:

Tabel 2. Perkembangan Alokasi Dana Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 1995/1996 - 1999/2000 (dalam jutaan rupiah)

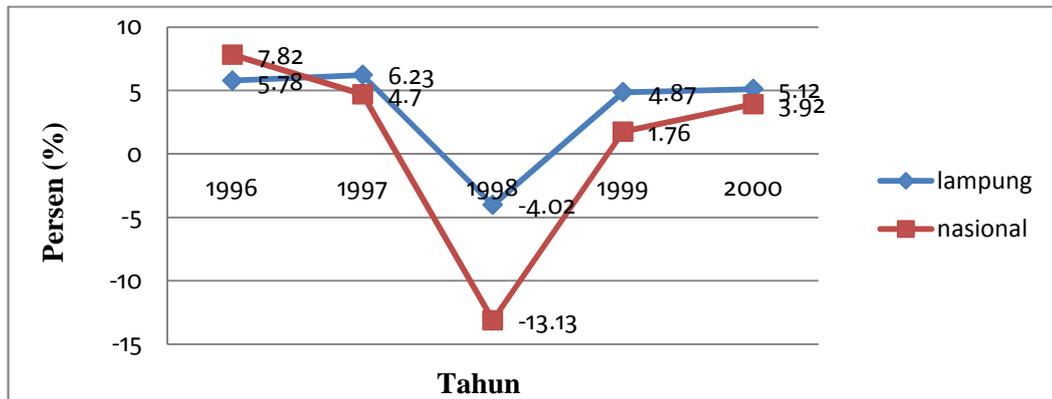
Tahun	DBH	Sumbangan / subsidi otonomi daerah	Bantuan pembangunan	total
1995-1996	7,094,615,353	28,791,282,484	48,074,004,000	83,959,901,837
1996-1997	8,586,734,934	28,771,881,086	54,036,945,000	91,395,561,020
1997-1998	8,845,806,751	32,408,595,271	62,108,354,000	103,362,756,022
1998-1999	12,435,870,300	37,666,843,883	66,593,440,000	116,696,154,183
1999-2000	11,710,939,124	48,662,308,579	93,813,665,069	154,186,912,772
Rerata	9,734,793,292	35,260,182,261	64,925,281,614	109,920,257,167

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, *djpk.go.id*

Dengan peningkatan dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung dituntut untuk mampu mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif, sehingga diharapkan akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal, terdapat fenomena menarik dari perekonomian daerah di Provinsi Lampung yaitu kondisi makro ekonomi daerah Lampung *pasca* pelaksanaan desentralisasi fiskal secara rata-rata menunjukkan gejala yang relatif kurang baik jika dibandingkan dengan era sebelum desentralisasi fiskal. Terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah, salah satunya dilihat dari pertumbuhan *output* perekonomian daerah yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana selama periode 1996 -2000 (sebelum desentralisasi fiskal) rata-rata perekonomian daerah di Provinsi Lampung tumbuh pada tingkat 5,20 % per tahun, lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan

ekonomi nasional sebesar 1,04 % pertahun (BPS, berbagai edisi BPS).

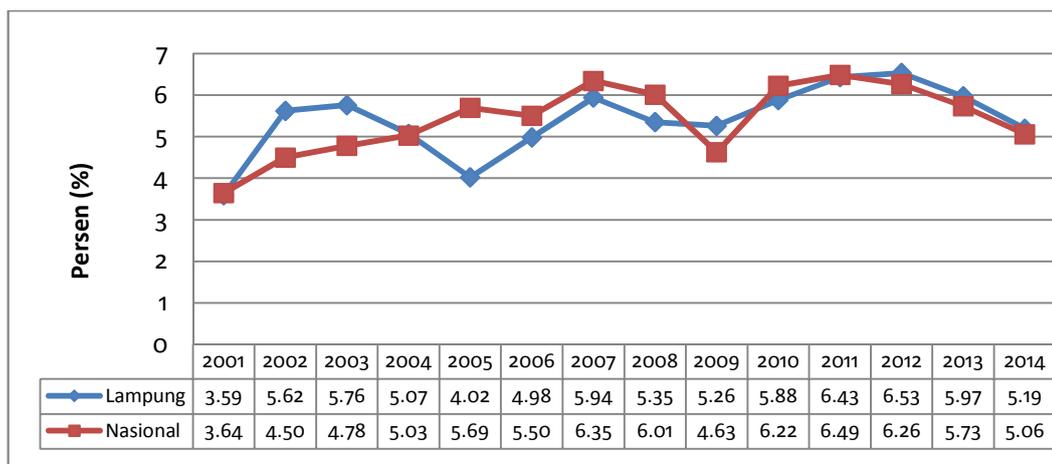


Sumber : BPS, Statistik Indonesia, Telah diolah.

Gambar 2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 1996-2000 (Sebelum Desentralisasi Fiskal)

Gambar 2 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada diatas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional kecuali pada tahun 1996 dimana tingkat pertumbuhan hanya sebesar 5,78 % dibawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,82 % . Sedangkan setelah era desentralisasi fiskal, secara rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung berada di atas tingkat pertumbuhan PDRB nasional sebagaimana ditunjukkan pada

Gambar 3. berikut:

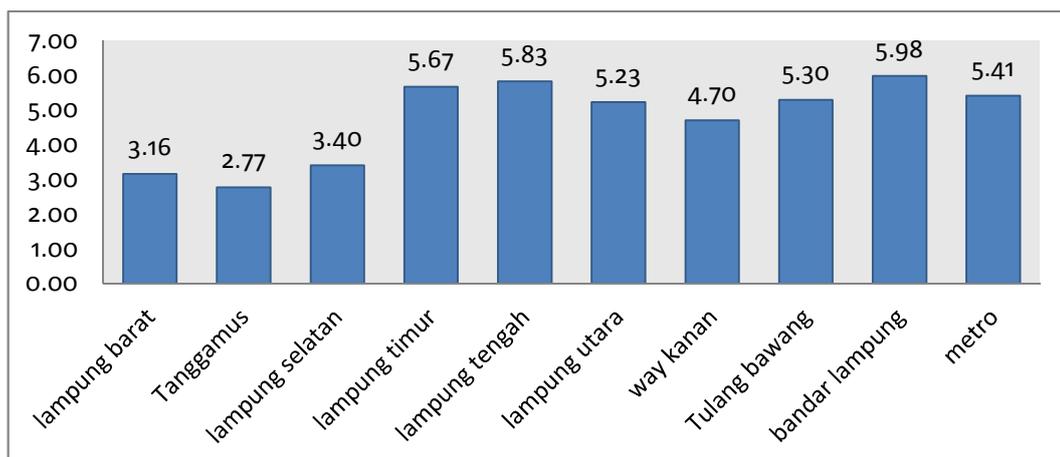


Sumber : BPS, Statistik Indonesia, Telah diolah.

Gambar 3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2001 - 2014 (Setelah Desentralisasi Fiskal)

Gambar 3 menunjukkan bahwa untuk tahun 2002-2004 , tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian menurun pada tahun 2005-2011 dimana tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada dibawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional kecuali pada tahun 2009 dimana tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung diatas pertumbuhan ekonomi nasional dengan nilai provinsi lampung sebesar 5,26 % sedangkan Nasional sebesar 4,63% lalu pada tahun 2012 -2014 tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, secara rata-rata perekonomian daerah di Provinsi Lampung meningkat dari 5,20 % sebelum desentralisasi fiskal menjadi 5,40 % setelah desentralisasi fiskal, walaupun nilai tersebut masih dibawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,42% setelah desentralisasi fiskal.

Apabila dilihat di tingkat kabupaten/kota Provinsi Lampung , nilai PDRB dimasing-masing kabupaten/kota bervariasi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 berikut:



Sumber : BPS Lampung, Lampung Dalam Angka Tahun 2001-2014,

Gambar 4 Rata-rata Pertumbuhan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2001-2014

Gambar 4 menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tertinggi di Provinsi Lampung dimiliki oleh Kota Bandar Lampung dengan rata-rata sebesar 5.98 %, di ikuti oleh Kabupaten Lampung Tengah dengan rata-rata sebesar 5,83 %, serta Kabupaten Lampung timur dengan rata-rata 5,67 %. Sedangkan rata-rata PDRB kabupaten/kota terendah dimiliki oleh Kabupaten Tulang Bawang dengan Pertumbuhan ekonomi sebesar 1,18 %.

B. Rumusan Masalah

Implikasi langsung dari kewenangan yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Dalam hal ini dengan cara menambah alokasi dana kepada masing-masing daerah dalam bentuk *block grant* yang berupa dana perimbangan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah (sjafrizal,2008), dari latar belakang diatas jelas bahwa dana perimbangan meningkat setiap tahunnya, namun dalam hal ini muncul pertanyaan apakah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum,Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Disparitas (ketimpangan) Pendapatan Provinsi Lampung ?

kemudian menurut Prud'Homme bahwa daerah yang lebih kaya akan memiliki *tax bases* yang lebih besar, dan oleh karenanya akan mampu untuk mengumpulkan pajak yang lebih banyak. Hal ini mengakibatkan dunia usaha maupun rumah tangga lebih menyukai untuk berada di daerah – daerah tersebut yang mengakibatkan *tax bases* semakin besar sehingga menimbulkan disparitas pendapatan, dalam hal ini jumlah PAD di Provinsi Lampung masih kurang baik dimana menunjukkan masih belum mandirinya daerah tersebut, sehingga dalam hal ini muncul pertanyaan Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari Penulisan ini adalah:

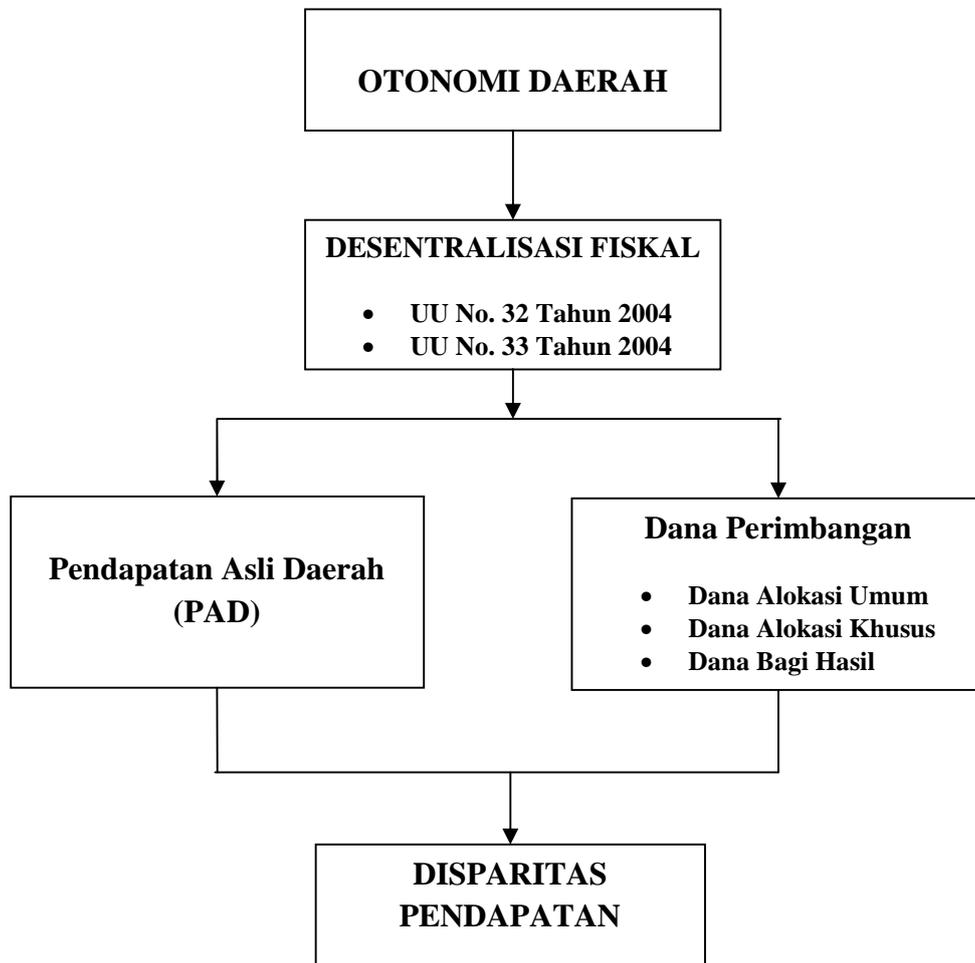
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Lampung .
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Lampung .

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Universitas Lampung.
2. Sebagai bagian dari proses pembelajaran dan sarana untuk mendalami pengetahuan mengenai kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia .
3. Sebagai bahan referensi dalam mengembangkan dan melakukan penelitian selanjutnya dengan obyek yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka teoritis yang dapat penulis paparkan mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Disparitas pendapatan seperti berikut:



Sumber : Kuncoro (2004)

Gambar 5 Kerangka Pemikiran

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya kebijakan otonomi daerah. (Waluyo, Joko. 2007). Dalam mengalokasikan pembelajaan atas sumber-sumber penerimaannya terkait dengan fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan

penuh untuk menentukan besaran dan sector apa yang akan dibelanjakan. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan (Hanif Nurcholis,2005).

Dalam perkembangannya desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif dan negative terhadap disparitas pendapatan daerah. Menurut Kyriacou, Gallo dan Sagales (2013) bahwa desentralisasi fiskal dapat berkontribusi terhadap pengurangan disparitas antar daerah. Sedangkan Sacchi dan Salotti (2011) menyatakan sebaliknya, mereka menyatakan bahwa desentralisasi berkontribusi terhadap meningkatnya disparitas antar daerah.

Dalam penelitian ini penulis menduga bahwa Desentralisasi fiskal berpengaruh Negatif terhadap Disparitas Pendapatan. Dengan adanya kebijakan Desentralisasi fiskal akan mengurangi tingkat disparitas pendapatan antar wilayah.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dimana tingkat kebenarannya masih perlu diuji. Berdasarkan permasalahan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Di duga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Disparitas Pendapatan.
2. Di duga Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Disparitas Pendapatan

G. Sistematika Penulisan

- I Pendahuluan. Menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Hipotesis, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.
- II Tinjauan Pustaka. Menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari literature dan sumber lainnya, dan penelitian-penelitian terdahulu yang memperkuat penelitian ini dan sebagai referensi.
- III Metodelogi Penelitian. Menguraikan bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan teknik pengambilan sampel, prosedur dan metode analisis data.
- IV Hasil dan Pembahasan. Menguraikan mengenai pembahasan dari deskripsi obyek penelitian dan hasil analisis data yang terdiri dari pengujian data secara parsial dan bersama-sama.
- V Simpulan dan saran. Menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran bagi penelitian di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Lampiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Desentralisasi Fiskal

Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Parson dalam Hidayat (2005) dalam Roy (2013) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup territorial suatu Negara. Sedangkan Mawhood (1987) dalam Roy (2013) dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan (*devolution*) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, pengertian desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kuncoro, 2009). Ini artinya desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1999) dalam Roy (2013):

- a) Desentralisasi politik yaitu pelimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan
- b) Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan
- c) Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam membahas desentralisasi fiskal, umumnya terdapat tiga variabel yang sering digunakan sebagai representasi desentralisasi fiskal, yaitu (Khusaini, 2006) dalam Roy (2013):

- a) Desentralisasi pengeluaran

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pemerintah (APBN) [Zhang dan Zou, 1998]. Selain itu Phillip dan Woller (1997) menggunakan rasio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran pemerintah (tidak termasuk pertahanan dan tunjangan sosial). Variabel ini menunjukkan ukuran relatif

pengeluaran pemerintah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

b) Desentralisasi pengeluaran pembangunan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN) (Zhang dan Zou, 1998). Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu, variabel ini juga mengekspresikan besarnya alokasi pengeluaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari rasio ini juga diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sektor publik atau tidak. Jika terdapat hubungan positif antara variabel ini terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah lokal dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi di sektor publik.

c) Desentralisasi penerimaan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total penerimaan pemerintah (Philips dan Woller, 1997). Variabel ini menjelaskan besaran relatif antara penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah pusat.

Sedangkan UNDP (2005) menyatakan bahwa paling tidak ada empat pilar dalam desentralisasi fiskal yaitu;

1. Dari sisi pengeluaran terkait dengan tugas tanggung jawab pengeluaran pada tingkat pemerintahan yang berbeda.

2. Dari sisi penerimaan terkait dengan sumber pajak dan pendapatan pada tingkat pemerintahan yang berbeda.
3. Transfer fiskal antar pemerintah
4. Pinjaman sub-nasional: dimana pemerintah daerah dapat meminjam (dalam berbagai cara) untuk membiayai kekurangan pendapatan.

B. Perkembangan Teori Desentralisasi Fiskal

1. Teori Desentralisasi Fiskal Tradisional

Teori desentralisasi fiskal tradisional biasa juga disebut teori generasi pertama dari desentralisasi fiskal (*“first-generation theory of fiscal federalism”*). Menurut Oates, Wallace G. (2001) dalam Roy (2013) teori ekonomi tradisional mengenai desentralisasi fiskal didasarkan pada potensi keuntungan kesejahteraan yang akan diperoleh dari alokasi sumber daya yang lebih efisien pada sektor publik, khususnya pada kasus barang publik lokal (*local public goods*). Kelompok barang publik tersebut terdiri dari pelayanan publik dimana yang mengkonsumsinya dibatasi secara geografis hanya untuk penduduk daerah tersebut. Dalam sistem sentralisasi fiskal, tingkat desentralisasi pemerintah berada dalam posisi untuk menentukan tingkat output yang akan dihasilkan terhadap barang-barang yang sesuai dengan biaya dan preferensi masyarakat lokal. Perbedaan dalam output lokal atas pelayanan publik akan memberikan keuntungan terhadap kesejahteraan ekonomi relatif terhadap output yang dihasilkan dalam sistem sentralistik yang lebih cenderung menghasilkan output pada tingkat yang sama untuk semua daerah.

a) Model Desentralisasi Tiebout

Tiebout (1956) dalam Paddu (2010) menunjukkan bahwa suatu model pembiayaan lokal dimana setiap keluarga bebas berpindah untuk memilih daerah yang sesuai dengan preferensi mereka atas pelayanan publik yang disediakan oleh daerah. Pada model tersebut Tiebout membuat suatu analog sektor publik lokal dengan pasar swasta yang mampu menghasilkan dengan pengalokasian sumber daya yang efisien. Karena individu dalam model tersebut tidak dihadapkan pada kendala tempat kerja dalam memilih tempat tinggal mereka, maka model Tiebout dapat dilihat sebagai model “pembiayaan metropolitan” (*metropolitan finance*). Pada umumnya melihat model tersebut menyediakan gambaran yang berguna bagi perilaku fiskal dalam menentukan metropolitan dimana individu dapat bekerja di tengah-tengah kota, tetapi memilih untuk tinggal di luar kota.

Beberapa ahli melihat model Tiebout ini sebagai pusat dari teori desentralisasi fiskal. Keuntungan dari desentralisasi fiskal yang dijelaskan dalam teorema desentralisasi (*Decentralization Theorem*) sebelumnya, tidak tergantung pada mobilitas penduduk, dimana dikatakan walaupun tidak terdapat mobilitas penduduk antar daerah, namun keuntungan kesejahteraan dari desentralisasi fiskal masih tetap ada, akibat adanya variasi permintaan dan fungsi biaya untuk pelayanan publik lokal antar daerah. Taxonomi Tiebout tersebut dapat meningkatkan keuntungan kesejahteraan dengan memperbolehkan penduduk dengan preferensi yang sama untuk berkumpul bersama, namun demikian walaupun tanpa menghasilkan output berdasarkan pada kondisi lokal. Singkatnya, model Tiebout bukan merupakan sinonim dari teori desentralisasi fiskal (Oates, 2001) dalam Roy (2013).

b. Teorema Desentralisasi Oates

Oates (1977) dalam Roy (2013) telah memformulasikan idenya dalam suatu teorema yang disebut Teorema Desentralisasi (*The Decentralization Theorema*). Poin yang mendasari adalah jika tidak terdapat keuntungan biaya (skala hasil) yang berhubungan dengan kondisi sentralisasi, maka pola desentralisasi terhadap barang publik yang menggambarkan adanya perbedaan selera diantara daerah-daerah yang ada akan meningkatkan kesejahteraan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari sentralisasi yang menggambarkan tingkat output yang seragam untuk semua daerah. Secara khusus, teorema tersebut bersandar pada dua asumsi yang kuat. Pertama, diasumsikan bahwa output dari barang-barang publik yang dihasilkan dapat memaksimalkan kesejahteraan penduduk dari masing-masing daerah. Kedua, kondisi sentralisasi diasumsikan menghasilkan barang publik pada tingkat yang sama untuk semua daerah. Hal ini tentu saja tidak harus benar. Tidak terdapat alasan yang prinsipil, mengapa pemerintah pusat tidak dapat menghasilkan barang publik lokal pada tingkat yang berbeda antar daerah sebagai respon terhadap adanya variasi dan biaya diantara daerah-daerah tersebut. Beberapa literature modern dalam ekonomi publik (termasuk teori sentralisasi fiskal yang baru) telah menolak secara eksplisit asumsi yang pertama atas dasar bahwa hal tersebut menganggap perilaku bijaksana itu adalah bagian dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Literatur tersebut lebih realistis melihat bahwa pandangan dari pegawai pemerintah sama dengan maksimisasi kepuasan sebagai fungsi sasaran mereka, dimana yang menjalankannya berada dalam kelompok insentif dan kendala-kendala yang tergantung pada situasi fiskal dan politik. Paddu (2010) dalam Roy

(2013) menjelaskan bahwa model *median-voter* yang cukup banyak digunakan sebagai contoh, persaingan pemilihan, yang menghasilkan keseimbangan dalam *median-voter*, yang tidak terlalu berbeda dengan yang paling efisien (Roy, 2013). Terdapat suatu literatur empiris yang substansial (paling tidak di U.S.) yang menemukan bahwa model *median-voter* menyediakan deskripsi atau publik di daerah dan di pusat (Roy, 2013).. Lebih spesifik, model *median-voter* sudah merupakan kerangka dasar bagi sebagian besar literature ekonometrik yang mengestimasi fungsi permintaan untuk barang-barang publik lokal. Menurut Oates (2001), asumsi yang pertama dalam teorema tersebut, jika dianggap sedikit longgar, tidak mensyaratkan kebijakan dari apara pemerintah, melainkan hanya hasil yang efisien.

Asumsi yang kedua adalah bahwa penyediaan barang publik lokal oleh pemerintah pusat menghasilkan tingkat output yang sama untuk semua daerah. Hal ini membuat pembuktian atas teorema tersebut mudah dan transparan. Ini sangat efektif membatasi hasil sentralisasi dan mengesampingkan diversifikasi efisien dari output lokal yang sesuai dengan biaya dan preferensi lokal. Namun, apakah kondisi tersebut memungkinkan dan logis. Literatur sebelumnya memberikan dua alasan yang mendukung. Pertama, terdapat suatu masalah yang berhubungan dengan informasi. Hal ini sulit (biaya besar) bagi pemerintah pusat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menyediakan output lokal yang sesuai dengan kondisi biaya dan selera penduduk lokal. Pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya dan memungkinkan lebih memiliki akses langsung untuk mengetahui selera masyarakatnya dan kondisi-kondisi lainnya yang berkaitan dengan kondisi pelayanan lokal. Kedua adalah alasan politis.

Mungkin secara politik, tidak memungkinkan pemerintah pusat menyediakan pelayanan publik yang lebih tinggi untuk suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain karena hal ini kelihatannya tidak adil. Singkatnya, pemerintah pusat mungkin menghadapi suatu kendala politik yang disebut “*equal treatment*” yang mendesak mereka untuk menyediakan pelayanan publik lokal yang seragam. Hambatan-hambatan tersebut yang menyebabkan pemerintah pusat tidak dapat menyediakan barang publik lokal yang efisien sudah lama diketahui.

2. Teori Desentralisasi Fiskal Baru

Menurut Oates (2001) dalam Roy (2013), terdapat dua teori baru tentang federalisme fiskal. Pertama disebut juga dengan teori generasi kedua dari federalisme (*The second generation theory of fiscal federalism*) yang menggambarkan sebagian besar motivasinya atas beberapa krisis fiskal yang ditimbulkan oleh perilaku menentang pada tingkat desentralisasi daerah. Kedua, disebut juga dengan pendekatan ekonomi politik terhadap federalisme fiskal (*the political economy approach to fiscal federalism*) mewakili evolusi yang lebih konvensional dari teori sektor publik. Kedua pendekatan tersebut mengembangkan struktur insentif yang diwujudkan ke dalam institusi fiskal dan politik pemerintahan pusat, tetapi perhatian utama mereka adalah sesuatu yang berbeda. Selanjutnya, kedua teori baru tersebut dianggap oleh Oates (2001) sebagai *Strand One* dan *Strand Two* dari teori federalisme fiskal baru.

Strand One menolak secara langsung pandangan tradisional yang umumnya menyukai tentang peran desentralisasi fiskal, dimana teori baru ini berpendapat bahwa terdapat bahaya yang sedikit serius sehubungan dengan manfaat riil dari desentralisasi fiskal. Secara khusus, model teoritik dalam *Strand One*

menggambarkan bagaimana tingkat desentralisasi pemerintah dapat mempunyai dorongan yang kuat untuk mengambil fiskal daerah dengan cara merusak gambaran sektor publik dan mungkin saja sektor ekonomi lainnya. Perilaku fiskal yang merusak ini bukan hanya sekedar masalah korupsi. Sumbernya adalah dorongan terstruktur yang dibangun di dalam institusi fiskal dan politik. Kekhawatirannya adalah bahwa dorongan tersebut dapat secara langsung menghasilkan keputusan fiskal yang menentang atau kurang baik yang pada akhirnya akan serius merusak fungsi sektor pemerintah. Elemen dasar dari *Strand One* ini adalah konsep kendala anggaran lunak (*soft budget constraint*).

Roy (2013) yang mula-mula memperkenalkan konsep ini pada tulisannya tentang perilaku perusahaan milik negara dinegara sosialis. Kornai melihat bahwa perusahaan ini diisolasi dari kemungkinan bangkrut dengan cara yang sangat mendasar: jika mereka mengalami kesulitan keuangan yang serius, maka mereka dapat meminta bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi untuk keluar dari kesulitan keuangannya. Istilah tersebut sudah begitu luas untuk mencakup suatu hal yang berhubungan dengan ekspektasi dimana terdapat organisasi yang mendukung (*supporting organization*) dan akan memberikan garansi atas kerugian keuangannya (Roy,2013). Dalam konteks sektor publik, hal ini meliputi suatu dunia dimana Gubernur provinsi atau bupati/walikota dari suatu kota yang besar dapat melihat pada otoritas publik yang lebih tinggi (pemerintah pusat) untuk membantu mereka keluar dari masalah fiskal defisit dan stok hutang publik yang semakin besar.

Selanjutnya, ekspektasi adanya bantuan tersebut biasanya akan menghambat dorongan perilaku fiskal kearah yang lebih bertanggung jawab. Dari mana datangnya ekspektasi jelek itu? Literatur *Strand One* khusus mengadopsi kerangka teoritik suatu kronologis permainan untuk menjelaskan fenomena tersebut (Widasin, 1997; Qian dan Roland, 1998, Goodspeed, 2002 dalam Padu, 2010).

Pada tahap pertama permainan ini, pemerintah pusat tidak akan datang untuk membantu kekurangan fiskal dari pemerintah daerah yang sudah terdesentralisasi. Masalahnya adalah apakah pernyataan tersebut dapat diterima atau tidak. Pada tahap kedua permainan tersebut, pemerintah daerah yang telah terdesentralisasi harus membuat suatu keputusan terhadap kredibilitas posisi pemerintah pusat. Sering ditemukan banyak hal yang menyebabkan janji pemerintah pusat tidak dapat ditepati. Pertama, pemerintah pusat diasumsikan sangat memperhatikan kesejahteraan penduduknya (jika bukan dengan alasan demi kepentingan orang banyak, paling tidak demi kepentingan untuk dipilih kembali).

Kegagalan pemerintahan provinsi atau pemerintah daerah dapat mengakibatkan konsekuensi yang fatal tidak hanya untuk penduduknya saja, tetapi juga akan ada efek *spillover* ke daerah tetangganya. Dalam situasi politik yang pasti, gubernur atau bupati/walikota dapat berada dalam posisi untuk menggeser tanggung jawab atas kegagalan fiskal mereka kepada pemerintah pusat. Dalam situasi itu untuk tetap berkuasa secara politik tergantung pada kesediaannya untuk menyediakan bantuan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Untuk alasan yang lebih kompleks, pemerintah daerah dapat memutuskan pada tahap kedua dari permainan tersebut yaitu komitmen pemerintah pusat untuk tidak

memberikan bantuan adalah tidak realistis. Sebagai hasilnya, mereka dapat melanjutkan tahap kedua dari permainan ini untuk menaikkan defisit fiskal dan utang yang besar. (Alternatif lain, jika pemerintah daerah menemukan bahwa tidak adanya bantuan pemerintah pusat tersebut dapat dipercaya, maka permainan akan berakhir disini) dihadapkan pada kegagalan fiskal di tingkat pemerintah yang sudah terdesentralisasi, maka pemerintah pusat pada tahap ketiga dari permainan ini, memutuskan apakah mereka akan memberikan bantuan keuangan pada daerah atau tidak. Seperti yang telah didiskusikan sebelumnya, terdapat beberapa alasan yang memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Umumnya literature *Strand One* meneliti sumber-sumber struktural dari kendala anggaran lunak dan bagaimana hal tersebut dapat ditingkatkan. Yang menjadi masalah disini adalah elemen-elemen khusus pada lingkungan politik dan ekonomi yang merusak disiplin fiskal, hal ini biasanya merupakan masalah yang kompleks.

Pada beberapa contoh, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah mempunyai akses langsung pada sistem perbankan di masyarakat untuk menyerap masalah utang mereka. Ketiadaan sistem pasar swasta yang sehat dan kuat juga mendukung terjadinya kendala anggaran lunak. Pasar modal yang efisien dan dibangun dengan baik, sebagai contoh, dapat melayani kendala anggaran untuk menjadi lebih kuat dengan cara meningkatkan biaya pinjaman lebih tinggi dan membatasi akses untuk meminjam bagi pemerintah yang mempunyai perilaku kurang baik dalam hal fiskal. Hampir sama, fungsi pasar tanah yang tepat akan mendorong pengambilan keputusan fiskal melalui kapitalisasi dari gambaran atau kinerja fiskal yang superior atau sangat kurang ke dalam nilai kekayaan lokal. Seperti yang dijelaskan oleh Weingast (1995) dalam Roy (2013) dan yang lainnya, sistem

pasar swasta yang kuat dapat memberikan kontribusi terhadap sistem kendala anggaran yang kuat. Secara keseluruhan, *Strand One* dari teori federalism fiskal baru, sudah fokus pada masalah kendala anggaran lunak dan kuat, dimana hal tersebut datang dari implikasinya terhadap perilaku fiskal, dan bagaimana kendala tersebut dapat diperkuat (Wildasin,2004: dalam Roy 2013). *Strand Two*, walaupun juga memperhitungkan institusi fiskal dan politik dan struktur insentif yang mereka ciptakan, namun menggunakan pendekatan yang berbeda. Literatur ekonomi politik dan pilihan publik (*public choice*) mencurahkan sebagian besar perhatiannya pada struktur legislatif dan proses pemilihan dalam mencoba memahami perbedaan hasil fiskal yang diproduksi oleh pemerintahan sentralistik dan pemerintahan desentralistik.

Dalam kerangka tradisional, pemerintah daerah diasumsikan untuk memilih tingkat barang publik lokal yang dapat memaksimalkan manfaat bersih bagi penduduk daerahnya masing-masing. Untuk menutupi *spillover* manfaat dari barang publik lokal tersebut terhadap penduduk daerah tetangganya, pandangan ini mengharapkan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat untuk mendampingi pembiayaan barang publik lokal tersebut dimana hal tersebut efektif untuk membiayai *spillover* manfaat. Dalam gambaran tersebut, desentralisasi fiskal sangat jelas dapat mendorong kesejahteraan dibandingkan dengan output yang dihasilkan secara sentralistik yang mempunyai karakteristik yang sama dan tingkat yang sama dari barang publik bagi semua daerah. Teori tradisional mampu menyelesaikan masalah koordinasi tersebut melalui sistem dana transfer (*intergovernmental grants*) dan mampu melengkapi apa yang disebut dengan kesesuaian preferensi (*preference matching*) oleh Lockwood (2006) dalam Roy

(2013), yaitu tingkat ketersediaan barang publik lokal yang sesuai dengan selera/preferensi penduduk lokal.

Pada literature *Strand Two*, pegawai pemerintah memiliki akses pada kegiatan yang bersifat *rent-seeking*. Mereka biasanya dibatasi oleh aturan dalam suatu proses pemilihan, sehingga jika mereka terlalu jauh keluar dari batas yang ditentukan, mereka bisa memprediksikan bahwa mereka tidak akan terpilih kembali. Sama halnya pada kondisi lokal, bagaimanapun terdapat beberapa kemungkinan bagi pegawai pemerintah untuk mendorong pemenuhan kepuasan maksimumnya sendiri seperti banyaknya informasi yang tidak sempurna dan tidak simetris yang dihasilkan dari perubahan produktivitas yang tidak diprediksi sebelumnya. Pada model tersebut, output dari berbagai barang publik lokal yang dihasilkan secara sentralistik antara suatu daerah dengan daerah lainnya adalah ditentukan oleh legislatif pusat yang biasanya merupakan perwakilan dari daerahnya masing-masing. Hal ini mengganti asumsi sederhana dari pandangan tradisional tentang keseragaman tingkat output lokal yang dihasilkan jika sentralistik. Selanjutnya, model *Strand Two* mencoba melihat karakteristik dan membandingkan hasil dari sentralisasi dan desentralisasi. Terdapat variasi yang signifikan dan jelas antara model *Strand Two* yang spesifik dihasilkan dalam jenis output dan macam-macam pemahaman yang disediakan. Pada model tersebut, disatu sisi sentralisasi cenderung membolehkan koordinasi yang lebih besar dalam keputusan fiskal, yaitu internalisasi dan eksternalisasi antar daerah, sementara disisi lainnya desentralisasi lebih efektif mendorong kesesuaian preferensi dan meningkatkan akuntabilitas. Oleh karena itu, pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi atas penyediaan barang publik lokal tertentu meliputi suatu dasar

tradeoff antara keuntungan dari meningkatkan koordinasi jika sentralisasi dan sensitivitas yang lebih besar atas output lokal terhadap preferensi lokal dan meningkatnya akuntabilitas yang diperoleh jika desentralisasi. Paddu (2010) dalam Roy (2013) menjelaskan bahwa berbagai variasi model *Strand Two* sangat hati-hati terhadap *tradeoff* dalam berbagai cara. Sebagai contoh, Seabright (1996) dalam Roy (2013), control dari otoritas daerah tertentu dalam legislatif pusat tergantung pada kemungkinan bahwa hal tersebut akan berpengaruh terhadap pemilihan anggota legislatif.

Selanjutnya, perilaku *rent-seeking* dari aparat pemerintah yang terdesentralisasi juga dibatasi oleh berbagai kendala. Sebagai contoh, semua pemilih dapat menilai kinerja aparat pemerintah daerah dengan membandingkan pelayanan publik yang dihasilkan daerahnya dengan yang dihasilkan daerah tetangganya, hal ini disebut juga "*yardstick competition*" (Besley dan Case, 1995; dalam Roy 2013).

Alternatif lain, berbagai bentuk persaingan pajak dapat memberikan suatu kendala bagi aktivitas *rent-seeking* (Edwards and Keen, 1996 ; dalam Roy, 2013). Jenis-jenis kendala bagi pengambil keputusan pelayanan public lokal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dari aparat pemerintah daerah, sehingga membuat desentralisasi fiskal lebih diinginkan jika dibandingkan dengan sentralisasi.

C. Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Prinsip Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman Negara-negara lain dalam melakukan desentralisasi. Sebagaimana diungkapkan Ter-minassian (1997) bahwa banyak Negara di dunia melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik yang

menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi. Lebih lanjut Ter-minassian menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas para politikus kepada konstituennya, serta untuk menjamin adanya keterkaitan antara kuantitas, kualitas, dan komposisi penyediaan layanan publik dengan kebutuhan penerima manfaat layanan tersebut. Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2009) dalam Roy (2013):

- a) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
- c) Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional.
- d) Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
- e) Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Tidak jauh berbeda, (Siddik, 2009) dalam Roy (2013) menjelaskan bahwa tujuan umum program desentralisasi fiskal di Indonesai adalah untuk; (1) membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah; (2) memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan memobilisasi pendapatan daerah dan kemudian nasional; (3) meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan mengembangkan partisipasi

konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; (4) mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah, dan (5) memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

Dalam tataran kebijakan yang lebih aplikatif, desentralisasi fiskal tersebut diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka memenuhi asas desentralisasi, pemberian dana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya. Di banyak Negara yang menganut desentralisasi, kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat lokal dan memberikan jaminan kepada rakyat bahwa pelayanan publik akan semakin membaik dan rakyat akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan (Bahl and Linn, 1992) dalam Roy,J (2013).

Mekanisme kebijakan transfer ke daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Secara nominal jenis transfer ke daerah dalam bentuk ini tercatat sebagai komponen terbesar dari dana transfer ke daerah (Mardiasmo, 2009). Lebih lanjut mardiasmo menjelaskan bahwa beranjak dari konsep dasar dan implementasinya dalam desentralisasi fiskal di Indonesia, besarnya transfer dana di daerah seharusnya

memiliki korelasi yang positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu pada anggaran belanja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja dapat diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi (jenis belanja). Pengklasifikasian belanja tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penganggaran dan pelaporan. Oleh karena itu, klasifikasi yang dapat memenuhi fungsi anggaran dan pelaporan harus diformulasikan sebagai berikut:

- a. klasifikasi menurut fungsi, digunakan untuk analisis historis dan formulasi kebijakan;
- b. klasifikasi organisasi, untuk keperluan akuntabilitas;
- c. klasifikasi menurut ekonomi, untuk tujuan statistik dan obyek (jenis belanja), ketaatan (compliance), pengendalian (control), dan analisis ekonomi.

D. Ketimpangan (*disparity*) Antar Daerah

1. Definisi Ketimpangan (*Disparity*)

Perbedaan kemajuan antar wilayah yang berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh yang analog dengan kesenjangan sehingga yang timbul adalah ketidakmerataan sehingga muncul pendapat dan studi-studi empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada posisi yang dikotomis dalam hal ini (Kuznet, 1955) mengemukakan suatu hipotesis yang di kenal dengan sebutan *U Hypothesis*, hipotesa ini dihasilkan lewat kajian empiris terhadap pola pertumbuhan ekonomi terhadap *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan.

Seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi maka setelah mencapai tahap tertentu *trade off* tersebut akan menghilang diganti dengan hubungan kolerasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan yang disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sector modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja.

Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan di sektor modern lebih cepat dibandingkan sektor tradisional. Berdasarkan tingkat kemajuannya wilayah-wilayah dalam suatu negara dapat di kelompokkan sebagai berikut :

1. Wilayah terlalu maju terutama kota-kota besar dimana terdapat batas pertumbuhan atau polarisasi, umpamanya dalam menghadapi masalah *diseconomies of scale* yang menyebabkan masalah manajemen, kenaikan biaya produksi, kenaikan biaya fasilitas pelayanan umum, kenaikan gaji dan upah, kenaikan harga bahan baku energi, peningkatan ongkos sosial.
2. Wilayah netral di cirikan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi, tidak ada kesesakan dan tekanan ongkos sosial dan merupakan kota satelit bagi wilayah yang terlalu padat.
3. Wilayah sedang merupakan wilayah dengan ciri-ciri campuran pola distribusi pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif baik yang merupakan gambaran kombinasi antara daerah maju dan kurang maju dimana terdapat juga pengangguran dan kelompok masyarakat miskin.

4. Wilayah kurang berkembang atau kurang maju yang merupakan wilayah dengan tingkat pertumbuhan jauh di bawah tingkat pertumbuhan nasional dan tidak ada tanda-tanda untuk dapat mengejar pertumbuhan dan pembangunan nasional seperti daerah-daerah konsentrasi industri yang sudah mundur.
5. Wilayah tidak berkembang merupakan wilayah tidak maju atau wilayah miskin dimana industri modern tidak pernah dapat berkembang dalam berbagai skala umumnya ditandai dengan daerah pertanian dengan usaha tani subsisten dan kecil, berpenduduk jarang dan tersebar dan tidak terdapat kota atau konsentrasi pemukiman yang relatif besar.

2. Teori Ketimpangan (*Disparity*)

Berikut ini akan dijelaskan dua teori ketimpangan wilayah, yaitu *Trickling Down Effect* dan *Polarization Effect*; serta *Backwash-Spread Effect*.

a) *Trickling Down Effect* dan *Polarization Effect*

Hirschman, Albert O. (1970) dalam tulisannya yang berjudul *Interregional and International Transmission of Economic Growth* membedakan daerah di suatu negara menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (*trickling down effect*). Sedangkan perbedaan antara kedua daerah tersebut melebar berarti terjadi imbas yang kurang baik, atau terjadi proses pengkutuban (*polarization Effect*).

b) *Spread Effect* dan *Backwash Effect*

Jinghan (1990) menyatakan bahwa ketimpangan regional dalam suatu negara berakar pada dasar nonekonomi. Ketimpangan berkaitan erat dengan system

kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif inilah yang mendorong pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki “harapan laba tinggi”, sementara wilayah-wilayah yang lain menjadi terlantar.

Myrdal menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya melalui dampak baik (*backwash effect*) dan dampak sebar (*spread effect*). *Backwash effect* terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (mis: wilayah A) mengakibatkan terjadinya perpindahan sumber daya (tenaga kerja, modal, dll) dari wilayah di sekitarnya (mis: wilayah B). sehingga wilayah A (yang awalnya merupakan wilayah yang lebih maju dibandingkan wilayah B), akan semakin maju dan wilayah B akan semakin tertinggal.

Spread effect terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (mis: wilayah A) mengakibatkan pertumbuhan wilayah disekitarnya (mis: wilayah B), yang memproduksi bahan mentah untuk keperluan industri yang sedang tumbuh di sentra-sentra tersebut, dan sentra-sentra yang mempunyai industri barang-barang konsumsi akan terangsang. Selanjutnya Myrdal menyimpulkan ketimpangan wilayah disebabkan oleh lemahnya dampak sebar (*spread effect*) dan kuatnya dampak balik (*backwash effect*).

3. Pengukuran Ketimpangan (*Disparity*)

Banyak perhatian telah diberikan terhadap bagaimana distribusi pendapatan berubah dalam masa pembangunan). Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Beberapa ukuran yang sering digunakan antara lain adalah:

a) Indeks Williamson

Indeks Williamson mengukur dispersi tingkat pendapatan per kapita daerah relatif terhadap rata-rata pendapatan nasional. Rumusan Indeks Williamson tersebut adalah (Syafrizal,2012):

$$IW = \frac{\overline{(Y_i - Y)^2 \cdot f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

- Y_i = PDRB per kapita di Kabupaten/kota i
 Y =PDRB per kapita rata-rata Provinsi
 f_i = Jumlah Penduduk di Kabupaten/kota
 n = Jumlah Penduduk Provinsi

b) Indeks Entropi Theil

Indeks entropi theil dapat digunakan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi theil juga dapat menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama kurun waktu tertentu; sedang yang kedua juga penting untuk mengkaji gambaran yang lebih rinci tentang ketimpangan spasial. Sebagai contoh ketimpangan antar wilayah dalam suatu Negara. (Kuncoro, 2004). Rumus dari Indeks Entropi Theil adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2004).:

$$I = \sum \frac{y_j}{Y} \times \log \frac{\frac{y_j}{Y}}{\frac{x_j}{X}}$$

Keterangan :

- $I(y)$ = Indeks Entropi Theil
 y_j = PDRB per kapita kabupaten/kota j
 Y = rata-rata PDRB per kapita provinsi j
 x_j = jumlah penduduk kabupaten/kota j
 X = jumlah penduduk provinsi

c) Indeks Jaime Bonet

Indeks ini merupakan pengukuran yang dilakukan oleh Bonet (2006) untuk mengukur ketimpangan sebagai variabel dependen dalam penelitiannya untuk menghitung pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan di Negara Kolumbia. Indeks Bonet pada provinsi untuk periode t ($IB_{i,t}$) dirumuskan sebagai berikut (Siagian,2010) :

$$IB_{i,t} = \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{NAL,t}} - 1$$

Keterangan :

- IB = ketimpangan provinsi i pada tahun t
 $PCGDP_{i,t}$ = PDRB per kapita kabupaten/kota i, pada tahun t
 $PCGDP_{NAL,t}$ = PDRB per kapita provinsi pada tahun t

Rumus tersebut menyatakan bahwa kesetaraan sempurna terjadi pada saat PDRB per kapita kabupaten/kota sama dengan PDRB per kapita provinsi. Oleh karena itu, ketimpangan wilayah diukur dari selisih antara PDRB per kapita relative (wilayah terhadap nasional) dan 1 (kondisi kesetaraan sempurna), yang diabsolutkan.

E. Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan

Gunar Mirdal dalam Roy (2013) mengemukakan bahwa ketimpangan antar daerah dapat disebabkan sebagai akibat dari pengaruh *backwash effect* yang lebih besar dari *spread effect*. Perpindahan tenaga kerja atau migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya karena perbedaan pelayanan publik ataupun karena perbedaan infrastruktur (daerah kaya dan daerah miskin) yang diberikan oleh pemerintah daerah menimbulkan *backwash effect*. Sementara jika terjadi peningkatan *market share* sebagai akibat dari peningkatan produksi sektor tertentu yang akan mendorong penggunaan teknologi yang lebih maju menyebabkan terjadinya *spread effect*.

Selanjutnya pendapat ini didukung oleh Hirschman (1970) bahwa terjadinya *trickle down effect* dari daerah *core* ke daerah *periphery* yang lebih kecil dari pada *polarization effect* akan menyebabkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan antar daerah. Prud'homme (1995) menyatakan bahwa dengan membayangkan terjadinya peningkatan ketimpangan antar daerah dalam kompetisi antar daerah disebabkan karena daerah kaya dan miskin mempunyai kemampuan perpajakan yang berbeda, sehingga rata-rata beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat di daerah miskin akan cenderung lebih besar dibanding dengan daerah yang lebih kaya. Hal ini akan menghasilkan lingkaran setan dimana yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Dengan argumentasi seperti tersebut diatas, maka kompetisi fiskal seperti itu harus dihilangkan dengan menerapkan sistem sentralisasi melalui sistem bantuan dari pemerintah pusat. MacKinnon (1995) dan Qian dan Weingast (1997) menjelaskan desentralisasi sebagai suatu alat komitmen dan menyatakan bahwa ketimpangan regional

berkaitan dengan efisiensi pelayanan publik. mereka mengarahkan perhatian pada dampak kebijakan yang bersifat insentif dari desentralisasi pada tingkat pemerintah daerah. Dengan anggaran yang terdesentralisasi kebijakan menutupi seluruh pembiayaan daerah yang kurang mampu melalui pembagian sumberdaya dari pemerintah pusat mungkin relatif melemahkan anggaran dan mengganggu insentif daerah untuk keluar dari daerah yang miskin. Sehingga sebenarnya desentralisasi memungkinkan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Disisi lain, Williamsom (dalam Roy, 2013) menyatakan bahwa disparitas antar wilayah akan cenderung semakin membesar khususnya pada tahapan awal terjadinya suatu proses pembangunan. lebih jauh dikatakan bahwa secara umum beberapa faktor diduga sebagai penyebab terjadinya peningkatan disparitas antar wilayah, yaitu:

- 1) Migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki keahlian dari daerah kurang berkembang ke daerah yang telah berkembang karena disana mereka memperoleh upah/gaji yang lebih besar.
- 2) Investasi cenderung dilakukan didaerah yang telah berkembang karena faktor pasar dimana keuntungannya relatif besar, demikian pula resiko kerugian pengaliran modal dari daerah miskin menuju daerah yang berkembang.
- 3) Kebijakan pemerintah, disadari maupun tanpa disadari cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sara dan prasarana kegiatan sosial ekonomi didaerah yang telah berkembang karena adanya kebutuhan yang lebih besar.

- 4) Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan yang didominasi oleh industri-industri di daerah yang telah berkembang.
- 5) Tidak adanya kaitan antara pasar daerah (*regional market*) telah menyebabkan rintangan untuk pemencaran dan pelipatgandaan pendapatan.

Toatubun (2011) dalam Roy (2013) yang melakukan penelitian tentang determinan disparitas pembangunan di Provinsi Maluku, menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan di Provinsi Maluku. Senada dengan Toatubun, Hartono (2009) dalam Roy (2013) yang meneliti tentang ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa alokasi dana pembangunan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan menurut Zasriati (2011) yang melakukan penelitian tentang pengaruh alokasi dana perimbangan terhadap ketimpangan ekonomi regional di Jambi, menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi regional sedangkan Dana bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi regional di Provinsi Jambi. Berdasarkan ulasan teori, empiris dan pendepatan yang telah dipaparkan diatas. maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong peningkatan pencapaian efisiensi dalam pelayanan dan produksi barang publik. Namun penerapan desentralisasi fiskal pada ruang yang berbeda, apakah karena perbedaan karakteristik ekonomi dan kelembagaan akan menghasilkan pengaruh yang berbeda. Faktor selain desentralisasi fiskal sangat berpengaruh dalam pencapaian efisiensi pelayanan

public maupun pengaruhnya terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomin dan perbaikan ketimpangan.

F. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Disparitas

Pendapatan

Prud'homme (1995) mengemukakan pendapatnya tentang pengaruh desentralisasi fiskal, khususnya desentralisasi pendapatan, terhadap disparitas pendapatan regional. Menurutnya wilayah-wilayah yang lebih kaya akan memiliki *tax bases* yang lebih besar, dan oleh karenanya akan mampu untuk mengumpulkan pajak yang lebih banyak. Dengan penghasilan pajak yang lebih besar maka daerah-daerah tersebut akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih dibandingkan daerah lain yang lebih miskin. Hal ini mengakibatkan dunia usaha maupun rumah tangga lebih menyukai untuk berada di daerah-daerah tersebut yang mengakibatkan *tax base* yang telah ada menjadi lebih besar lagi daripada sebelumnya. Dengan kondisi demikian maka akan terjadi disparitas pendapatan regional. Namun demikian, bertentangan dengan pendapat tersebut, berbagai hasil penelitian terkini yang antara lain oleh Gil, Pascud, dan Rapun (2002), Widhiyanto (2008), serta Akai dan Sakata (2005) menunjukkan bahwa PAD/*Local Revenue* justru berkorelasi negatif secara signifikan terhadap disparitas pendapatan regional yang artinya bahwa PAD justru akan dapat menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional. Dengan demikian tampak bahwa terdapat dua pendapat tentang dampak variabel PAD terhadap disparitas pendapatan regional, di mana pendapat pertama menyatakan PAD akan meningkatkan disparitas pendapatan regional sementara pendapat lainnya

menyatakan sebaliknya bahwa PAD justru akan menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional.

G. Hubungan Dana Perimbangan dengan Disparitas Pendapatan

Menurut Sjafrizal (2008) pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi juga dapat untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan cara menambah alokasi dana kepada masing-masing daerah dalam bentuk *block grant* yang berupa dana perimbangan. Dengan demikian persamaan yang digunakan adalah dalam bentuk linier. Zasriati (2011) mengatakan dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh negative atau menurun secara signifikan terhadap ketimpangan (*disparity*). Sedangkan dana bagi hasil berpengaruh positif atau mendorong secara signifikan.

Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan tampaknya perlu lebih diperhatikan di masa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional.

H. Tinjauan Empiris

Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan referensi peneliti untuk membandingkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian :

Tabel 3 Tinjauan Empiris

No.	Judul / Penulis	Variabel	Kesimpulan
1	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional Di Indonesia Tahun 2001-2008/ Muhammad Andry Nurman (2013)	Variabel yang digunakan sebagai proxy dari desentralisasi fiskal adalah: belanja langsung (desentralisasi pengeluaran), serta PAD, DAU dan Dana Bagi Hasil (desentralisasi penerimaan)	belanja langsung telah mampu untuk mengurangi disparitas pendapatan regional, sebaliknya DAU justru mengakibatkan meningkatnya disparitas pendapatan regional
2.	<i>Fiscal Decentralization And Indonesia Regional Income Disparity (1994-2004)</i> /Imam Widhiyanto (2008)	Variabel yang digunakan adalah PDRB, Pengeluaran Pemerintah, PAD dan Dana Perimbangan	Desentralisasi fiskal di Indonesia meningkatkan jumlah pertumbuhan ekonomi dan menurunkan disparitas pendapatan daerah selama periode pengamatan.
3.	Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah Di Indonesia / Joko Waluyo (2007)	Variabel target ditentukan sebagai berikut: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA), sehingga dispesifikasikan sebagai variabel eksogen. Sedangkan sebagai variabel targetnya adalah Pertumbuhan Ekonomi Daerah (DPDRB) dan PDRB perkapita setiap propinsi di Indonesia (PDRBCAP).	dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme transmisi, yaitu: 1) Melalui mekanisme pemberian dana bagi hasil pajak (DBHP), dan bagi hasil sumber daya alam (DBHSDA) yang berkorelasi negatif, 2) Melalui mekanisme pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) yang efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah.

4.	<p><i>Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance</i> /Andreas P. Kyriacou, Leonel Muinelo-Gallo dan Orriol Roca-Sagales (2013)</p>	<p>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: PDB rill, investasi public dan swasta, perdagangan dan belanja public.</p>	<p>Bahwa desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi suatu daerah dalam pengaturan kualitas pemerintah yang lebih baik dan desentralisasi fiskal juga dapat mengurangi perbedaan pendapatan didaerah. Akan tetapi potensi ini tidak dapat direalisasikan karena masalah tata kelola terkait dengan otoritas subnasional. Sehingga hal ini yang mengarah kedisparitas regional yang lebih luas di negara-negara dengan tata kelola yang buruk.</p>
5.	<p><i>Fiscal Decentralization and Regional Disparity : A Panel Data Approach for OECD Countries</i> /Christian Lessmann (2006)</p>	<p>Variabel yang digunakan sebagai berikut: Jumlah penduduk, Jumlah urbanisasi, tingkat pengangguran, transfer pemerintah pusat, pendapatan dari sector pertanian dan retribusi social.</p>	<p>dengan derajat yang semakin tinggi dari desentralisasi maka semakin berhubungan kuat dengan rendahnya ketimpangan wilayah. Di mana wilayah yang miskin tidak akan dirugikan dengan adanya desentralisasi, begitupun sebaliknya</p>
6.	<p><i>Fiscal decentralization and regional disparities: evidence from several European Union countries</i> /Roberto Ezcurra, Pedro Pascual (2008)</p>	<p>Variabel yang digunakan sebagai berikut: GDP perkapita, populasi penduduk dan total belanja</p>	<p>desentralisasi fiskal berhubungan negatif dengan tingkat ketimpangan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di negara-negara Uni Eropa.</p>

7.	<p>Analisis ketimpangan pembangunan ; Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011 /Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo (2013)</p>	<p>Variabel PDRB, PAD, DAU, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan</p>	<p>menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Jawa Timur masih rendah. Hipotesis Kuznets juga berlaku di Provinsi ini. PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan untuk PDRB dan DAU tidak diketahui pengaruhnya dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam uji asumsi klasik.</p>
8.	<p>Analisis Hubungan Dana Perimbangan dan Ketimpangan Pembangunan Provinsi Aceh /Saifunnizar(2013)</p>	<p>Variabel terikat ketimpangan pembangunan (indeks Williamson) dan variable bebas dana perimbangan</p>	<p>Dana perimbangan berhubungan negative dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di provinsi aceh.</p>

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Desentralisasi Fiskal

Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Parson dalam Hidayat (2005) dalam Roy (2013) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup territorial suatu Negara. Sedangkan Mawhood (1987) dalam Roy (2013) dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan (*devolution*) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, pengertian desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kuncoro, 2009). Ini artinya desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1999) dalam Roy (2013):

- a) Desentralisasi politik yaitu pelimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan
- b) Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan
- c) Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam membahas desentralisasi fiskal, umumnya terdapat tiga variabel yang sering digunakan sebagai representasi desentralisasi fiskal, yaitu (Khusaini, 2006) dalam Roy (2013):

- a) Desentralisasi pengeluaran

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pemerintah (APBN) [Zhang dan Zou, 1998]. Selain itu Phillip dan Woller (1997) menggunakan rasio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran pemerintah (tidak termasuk pertahanan dan tunjangan sosial). Variabel ini menunjukkan ukuran relatif

pengeluaran pemerintah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

b) Desentralisasi pengeluaran pembangunan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN) (Zhang dan Zou, 1998). Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu, variabel ini juga mengekspresikan besarnya alokasi pengeluaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari rasio ini juga diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sektor publik atau tidak. Jika terdapat hubungan positif antara variabel ini terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah lokal dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi di sektor publik.

c) Desentralisasi penerimaan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total penerimaan pemerintah (Philips dan Woller, 1997). Variabel ini menjelaskan besaran relatif antara penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah pusat.

Sedangkan UNDP (2005) menyatakan bahwa paling tidak ada empat pilar dalam desentralisasi fiskal yaitu;

1. Dari sisi pengeluaran terkait dengan tugas tanggung jawab pengeluaran pada tingkat pemerintahan yang berbeda.

2. Dari sisi penerimaan terkait dengan sumber pajak dan pendapatan pada tingkat pemerintahan yang berbeda.
3. Transfer fiskal antar pemerintah
4. Pinjaman sub-nasional: dimana pemerintah daerah dapat meminjam (dalam berbagai cara) untuk membiayai kekurangan pendapatan.

B. Perkembangan Teori Desentralisasi Fiskal

1. Teori Desentralisasi Fiskal Tradisional

Teori desentralisasi fiskal tradisional biasa juga disebut teori generasi pertama dari desentralisasi fiskal (*“first-generation theory of fiscal federalism”*). Menurut Oates, Wallace G. (2001) dalam Roy (2013) teori ekonomi tradisional mengenai desentralisasi fiskal didasarkan pada potensi keuntungan kesejahteraan yang akan diperoleh dari alokasi sumber daya yang lebih efisien pada sektor publik, khususnya pada kasus barang publik lokal (*local public goods*). Kelompok barang publik tersebut terdiri dari pelayanan publik dimana yang mengkonsumsinya dibatasi secara geografi hanya untuk penduduk daerah tersebut. Dalam sistem sentralisasi fiskal, tingkat desentralisasi pemerintah berada dalam posisi untuk menentukan tingkat output yang akan dihasilkan terhadap barang-barang yang sesuai dengan biaya dan preferensi masyarakat lokal. Perbedaan dalam output lokal atas pelayanan publik akan memberikan keuntungan terhadap kesejahteraan ekonomi relatif terhadap output yang dihasilkan dalam sistem sentralistik yang lebih cenderung menghasilkan output pada tingkat yang sama untuk semua daerah.

a) Model Desentralisasi Tiebout

Tiebout (1956) dalam Paddu (2010) menunjukkan bahwa suatu model pembiayaan lokal dimana setiap keluarga bebas berpindah untuk memilih daerah yang sesuai dengan preferensi mereka atas pelayanan publik yang disediakan oleh daerah. Pada model tersebut Tiebout membuat suatu analog sektor publik lokal dengan pasar swasta yang mampu menghasilkan dengan pengalokasian sumber daya yang efisien. Karena individu dalam model tersebut tidak dihadapkan pada kendala tempat kerja dalam memilih tempat tinggal mereka, maka model Tiebout dapat dilihat sebagai model “pembiayaan metropolitan” (*metropolitan finance*). Pada umumnya melihat model tersebut menyediakan gambaran yang berguna bagi perilaku fiskal dalam menentukan metropolitan dimana individu dapat bekerja di tengah-tengah kota, tetapi memilih untuk tinggal di luar kota.

Beberapa ahli melihat model Tiebout ini sebagai pusat dari teori desentralisasi fiskal. Keuntungan dari desentralisasi fiskal yang dijelaskan dalam teorema desentralisasi (*Decentralization Theorem*) sebelumnya, tidak tergantung pada mobilitas penduduk, dimana dikatakan walaupun tidak terdapat mobilitas penduduk antar daerah, namun keuntungan kesejahteraan dari desentralisasi fiskal masih tetap ada, akibat adanya variasi permintaan dan fungsi biaya untuk pelayanan publik lokal antar daerah. Taxonomi Tiebout tersebut dapat meningkatkan keuntungan kesejahteraan dengan memperbolehkan penduduk dengan preferensi yang sama untuk berkumpul bersama, namun demikian walaupun tanpa menghasilkan output berdasarkan pada kondisi lokal. Singkatnya, model Tiebout bukan merupakan sinonim dari teori desentralisasi fiskal (Oates, 2001) dalam Roy (2013).

b. Teorema Desentralisasi Oates

Oates (1977) dalam Roy (2013) telah memformulasikan idenya dalam suatu teorema yang disebut Teorema Desentralisasi (*The Decentralization Theorema*). Poin yang mendasari adalah jika tidak terdapat keuntungan biaya (skala hasil) yang berhubungan dengan kondisi sentralisasi, maka pola desentralisasi terhadap barang publik yang menggambarkan adanya perbedaan selera diantara daerah-daerah yang ada akan meningkatkan kesejahteraan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari sentralisasi yang menggambarkan tingkat output yang seragam untuk semua daerah. Secara khusus, teorema tersebut bersandar pada dua asumsi yang kuat. Pertama, diasumsikan bahwa output dari barang-barang publik yang dihasilkan dapat memaksimalkan kesejahteraan penduduk dari masing-masing daerah. Kedua, kondisi sentralisasi diasumsikan menghasilkan barang publik pada tingkat yang sama untuk semua daerah. Hal ini tentu saja tidak harus benar. Tidak terdapat alasan yang prinsipil, mengapa pemerintah pusat tidak dapat menghasilkan barang publik lokal pada tingkat yang berbeda antar daerah sebagai respon terhadap adanya variasi dan biaya diantara daerah-daerah tersebut. Beberapa literature modern dalam ekonomi publik (termasuk teori sentralisasi fiskal yang baru) telah menolak secara eksplisit asumsi yang pertama atas dasar bahwa hal tersebut menganggap perilaku bijaksana itu adalah bagian dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Literatur tersebut lebih realistis melihat bahwa pandangan dari pegawai pemerintah sama dengan maksimisasi kepuasan sebagai fungsi sasaran mereka, dimana yang menjalankannya berada dalam kelompok insentif dan kendala-kendala yang tergantung pada situasi fiskal dan politik. Paddu (2010) dalam Roy

(2013) menjelaskan bahwa model *median-voter* yang cukup banyak digunakan sebagai contoh, persaingan pemilihan, yang menghasilkan keseimbangan dalam *median-voter*, yang tidak terlalu berbeda dengan yang paling efisien (Roy, 2013). Terdapat suatu literatur empiris yang substansial (paling tidak di U.S.) yang menemukan bahwa model *median-voter* menyediakan deskripsi atau publik di daerah dan di pusat (Roy, 2013).. Lebih spesifik, model *median-voter* sudah merupakan kerangka dasar bagi sebagian besar literature ekonometrik yang mengestimasi fungsi permintaan untuk barang-barang publik lokal. Menurut Oates (2001), asumsi yang pertama dalam teorema tersebut, jika dianggap sedikit longgar, tidak mensyaratkan kebijakan dari apara pemerintah, melainkan hanya hasil yang efisien.

Asumsi yang kedua adalah bahwa penyediaan barang publik lokal oleh pemerintah pusat menghasilkan tingkat output yang sama untuk semua daerah. Hal ini membuat pembuktian atas teorema tersebut mudah dan transparan. Ini sangat efektif membatasi hasil sentralisasi dan mengesampingkan diversifikasi efisien dari output lokal yang sesuai dengan biaya dan preferensi lokal. Namun, apakah kondisi tersebut memungkinkan dan logis. Literatur sebelumnya memberikan dua alasan yang mendukung. Pertama, terdapat suatu masalah yang berhubungan dengan informasi. Hal ini sulit (biaya besar) bagi pemerintah pusat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menyediakan output lokal yang sesuai dengan kondisi biaya dan selera penduduk lokal. Pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya dan memungkinkan lebih memiliki akses langsung untuk mengetahui selera masyarakatnya dan kondisi-kondisi lainnya yang berkaitan dengan kondisi pelayanan lokal. Kedua adalah alasan politis.

Mungkin secara politik, tidak memungkinkan pemerintah pusat menyediakan pelayanan publik yang lebih tinggi untuk suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain karena hal ini kelihatannya tidak adil. Singkatnya, pemerintah pusat mungkin menghadapi suatu kendala politik yang disebut “*equal treatment*” yang mendesak mereka untuk menyediakan pelayanan publik lokal yang seragam. Hambatan-hambatan tersebut yang menyebabkan pemerintah pusat tidak dapat menyediakan barang publik lokal yang efisien sudah lama diketahui.

2. Teori Desentralisasi Fiskal Baru

Menurut Oates (2001) dalam Roy (2013), terdapat dua teori baru tentang federalisme fiskal. Pertama disebut juga dengan teori generasi kedua dari federalisme (*The second generation theory of fiscal federalism*) yang menggambarkan sebagian besar motivasinya atas beberapa krisis fiskal yang ditimbulkan oleh perilaku menentang pada tingkat desentralisasi daerah. Kedua, disebut juga dengan pendekatan ekonomi politik terhadap federalisme fiskal (*the political economy approach to fiscal federalism*) mewakili evolusi yang lebih konvensional dari teori sektor publik. Kedua pendekatan tersebut mengembangkan struktur insentif yang diwujudkan ke dalam institusi fiskal dan politik pemerintahan pusat, tetapi perhatian utama mereka adalah sesuatu yang berbeda. Selanjutnya, kedua teori baru tersebut dianggap oleh Oates (2001) sebagai *Strand One* dan *Strand Two* dari teori federalisme fiskal baru.

Strand One menolak secara langsung pandangan tradisional yang umumnya menyukai tentang peran desentralisasi fiskal, dimana teori baru ini berpendapat bahwa terdapat bahaya yang sedikit serius sehubungan dengan manfaat riil dari desentralisasi fiskal. Secara khusus, model teoritik dalam *Strand One*

menggambarkan bagaimana tingkat desentralisasi pemerintah dapat mempunyai dorongan yang kuat untuk mengambil fiskal daerah dengan cara merusak gambaran sektor publik dan mungkin saja sektor ekonomi lainnya. Perilaku fiskal yang merusak ini bukan hanya sekedar masalah korupsi. Sumbernya adalah dorongan terstruktur yang dibangun di dalam institusi fiskal dan politik. Kekhawatirannya adalah bahwa dorongan tersebut dapat secara langsung menghasilkan keputusan fiskal yang menentang atau kurang baik yang pada akhirnya akan serius merusak fungsi sektor pemerintah. Elemen dasar dari *Strand One* ini adalah konsep kendala anggaran lunak (*soft budget constraint*).

Roy (2013) yang mula-mula memperkenalkan konsep ini pada tulisannya tentang perilaku perusahaan milik negara dinegara sosialis. Kornai melihat bahwa perusahaan ini diisolasi dari kemungkinan bangkrut dengan cara yang sangat mendasar: jika mereka mengalami kesulitan keuangan yang serius, maka mereka dapat meminta bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi untuk keluar dari kesulitan keuangannya. Istilah tersebut sudah begitu luas untuk mencakup suatu hal yang berhubungan dengan ekspektasi dimana terdapat organisasi yang mendukung (*supporting organization*) dan akan memberikan garansi atas kerugian keuangannya (Roy,2013). Dalam konteks sektor publik, hal ini meliputi suatu dunia dimana Gubernur provinsi atau bupati/walikota dari suatu kota yang besar dapat melihat pada otoritas publik yang lebih tinggi (pemerintah pusat) untuk membantu mereka keluar dari masalah fiskal defisit dan stok hutang publik yang semakin besar.

Selanjutnya, ekspektasi adanya bantuan tersebut biasanya akan menghambat dorongan perilaku fiskal kearah yang lebih bertanggung jawab. Dari mana datangnya ekspektasi jelek itu? Literatur *Strand One* khusus mengadopsi kerangka teoritik suatu kronologis permainan untuk menjelaskan fenomena tersebut (Widasin, 1997; Qian dan Roland, 1998, Goodspeed, 2002 dalam Padu, 2010).

Pada tahap pertama permainan ini, pemerintah pusat tidak akan datang untuk membantu kekurangan fiskal dari pemerintah daerah yang sudah terdesentralisasi. Masalahnya adalah apakah pernyataan tersebut dapat diterima atau tidak. Pada tahap kedua permainan tersebut, pemerintah daerah yang telah terdesentralisasi harus membuat suatu keputusan terhadap kredibilitas posisi pemerintah pusat. Sering ditemukan banyak hal yang menyebabkan janji pemerintah pusat tidak dapat ditepati. Pertama, pemerintah pusat diasumsikan sangat memperhatikan kesejahteraan penduduknya (jika bukan dengan alasan demi kepentingan orang banyak, paling tidak demi kepentingan untuk dipilih kembali).

Kegagalan pemerintahan provinsi atau pemerintah daerah dapat mengakibatkan konsekuensi yang fatal tidak hanya untuk penduduknya saja, tetapi juga akan ada efek *spillover* ke daerah tetangganya. Dalam situasi politik yang pasti, gubernur atau bupati/walikota dapat berada dalam posisi untuk menggeser tanggung jawab atas kegagalan fiskal mereka kepada pemerintah pusat. Dalam situasi itu untuk tetap berkuasa secara politik tergantung pada kesediaannya untuk menyediakan bantuan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Untuk alasan yang lebih kompleks, pemerintah daerah dapat memutuskan pada tahap kedua dari permainan tersebut yaitu komitmen pemerintah pusat untuk tidak

memberikan bantuan adalah tidak realistis. Sebagai hasilnya, mereka dapat melanjutkan tahap kedua dari permainan ini untuk menaikkan defisit fiskal dan utang yang besar. (Alternatif lain, jika pemerintah daerah menemukan bahwa tidak adanya bantuan pemerintah pusat tersebut dapat dipercaya, maka permainan akan berakhir disini) dihadapkan pada kegagalan fiskal di tingkat pemerintah yang sudah terdesentralisasi, maka pemerintah pusat pada tahap ketiga dari permainan ini, memutuskan apakah mereka akan memberikan bantuan keuangan pada daerah atau tidak. Seperti yang telah didiskusikan sebelumnya, terdapat beberapa alasan yang memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Umumnya literature *Strand One* meneliti sumber-sumber struktural dari kendala anggaran lunak dan bagaimana hal tersebut dapat ditingkatkan. Yang menjadi masalah disini adalah elemen-elemen khusus pada lingkungan politik dan ekonomi yang merusak disiplin fiskal, hal ini biasanya merupakan masalah yang kompleks.

Pada beberapa contoh, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah mempunyai akses langsung pada sistem perbankan di masyarakat untuk menyerap masalah utang mereka. Ketiadaan sistem pasar swasta yang sehat dan kuat juga mendukung terjadinya kendala anggaran lunak. Pasar modal yang efisien dan dibangun dengan baik, sebagai contoh, dapat melayani kendala anggaran untuk menjadi lebih kuat dengan cara meningkatkan biaya pinjaman lebih tinggi dan membatasi akses untuk meminjam bagi pemerintah yang mempunyai perilaku kurang baik dalam hal fiskal. Hampir sama, fungsi pasar tanah yang tepat akan mendorong pengambilan keputusan fiskal melalui kapitalisasi dari gambaran atau kinerja fiskal yang superior atau sangat kurang ke dalam nilai kekayaan lokal. Seperti yang dijelaskan oleh Weingast (1995) dalam Roy (2013) dan yang lainnya, sistem

pasar swasta yang kuat dapat memberikan kontribusi terhadap sistem kendala anggaran yang kuat. Secara keseluruhan, *Strand One* dari teori federalism fiskal baru, sudah fokus pada masalah kendala anggaran lunak dan kuat, dimana hal tersebut datang dari implikasinya terhadap perilaku fiskal, dan bagaimana kendala tersebut dapat diperkuat (Wildasin,2004: dalam Roy 2013). *Strand Two*, walaupun juga memperhitungkan institusi fiskal dan politik dan struktur insentif yang mereka ciptakan, namun menggunakan pendekatan yang berbeda. Literatur ekonomi politik dan pilihan publik (*public choice*) mencurahkan sebagian besar perhatiannya pada struktur legislatif dan proses pemilihan dalam mencoba memahami perbedaan hasil fiskal yang diproduksi oleh pemerintahan sentralistik dan pemerintahan desentralistik.

Dalam kerangka tradisional, pemerintah daerah diasumsikan untuk memilih tingkat barang publik lokal yang dapat memaksimalkan manfaat bersih bagi penduduk daerahnya masing-masing. Untuk menutupi *spillover* manfaat dari barang publik lokal tersebut terhadap penduduk daerah tetangganya, pandangan ini mengharapkan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat untuk mendampingi pembiayaan barang publik lokal tersebut dimana hal tersebut efektif untuk membiayai *spillover* manfaat. Dalam gambaran tersebut, desentralisasi fiskal sangat jelas dapat mendorong kesejahteraan dibandingkan dengan output yang dihasilkan secara sentralistik yang mempunyai karakteristik yang sama dan tingkat yang sama dari barang publik bagi semua daerah. Teori tradisional mampu menyelesaikan masalah koordinasi tersebut melalui sistem dana transfer (*intergovernmental grants*) dan mampu melengkapi apa yang disebut dengan kesesuaian preferensi (*preference matching*) oleh Lockwood (2006) dalam Roy

(2013), yaitu tingkat ketersediaan barang publik lokal yang sesuai dengan selera/preferensi penduduk lokal.

Pada literature *Strand Two*, pegawai pemerintah memiliki akses pada kegiatan yang bersifat *rent-seeking*. Mereka biasanya dibatasi oleh aturan dalam suatu proses pemilihan, sehingga jika mereka terlalu jauh keluar dari batas yang ditentukan, mereka bisa memprediksikan bahwa mereka tidak akan terpilih kembali. Sama halnya pada kondisi lokal, bagaimanapun terdapat beberapa kemungkinan bagi pegawai pemerintah untuk mendorong pemenuhan kepuasan maksimumnya sendiri seperti banyaknya informasi yang tidak sempurna dan tidak simetris yang dihasilkan dari perubahan produktivitas yang tidak diprediksi sebelumnya. Pada model tersebut, output dari berbagai barang publik lokal yang dihasilkan secara sentralistik antara suatu daerah dengan daerah lainnya adalah ditentukan oleh legislatif pusat yang biasanya merupakan perwakilan dari daerahnya masing-masing. Hal ini mengganti asumsi sederhana dari pandangan tradisional tentang keseragaman tingkat output lokal yang dihasilkan jika sentralistik. Selanjutnya, model *Strand Two* mencoba melihat karakteristik dan membandingkan hasil dari sentralisasi dan desentralisasi. Terdapat variasi yang signifikan dan jelas antara model *Strand Two* yang spesifik dihasilkan dalam jenis output dan macam-macam pemahaman yang disediakan. Pada model tersebut, disatu sisi sentralisasi cenderung membolehkan koordinasi yang lebih besar dalam keputusan fiskal, yaitu internalisasi dan eksternalisasi antar daerah, sementara disisi lainnya desentralisasi lebih efektif mendorong kesesuaian preferensi dan meningkatkan akuntabilitas. Oleh karena itu, pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi atas penyediaan barang publik lokal tertentu meliputi suatu dasar

tradeoff antara keuntungan dari meningkatkan koordinasi jika sentralisasi dan sensitivitas yang lebih besar atas output lokal terhadap preferensi lokal dan meningkatnya akuntabilitas yang diperoleh jika desentralisasi. Paddu (2010) dalam Roy (2013) menjelaskan bahwa berbagai variasi model *Strand Two* sangat hati-hati terhadap *tradeoff* dalam berbagai cara. Sebagai contoh, Seabright (1996) dalam Roy (2013), control dari otoritas daerah tertentu dalam legislatif pusat tergantung pada kemungkinan bahwa hal tersebut akan berpengaruh terhadap pemilihan anggota legislatif.

Selanjutnya, perilaku *rent-seeking* dari aparat pemerintah yang terdesentralisasi juga dibatasi oleh berbagai kendala. Sebagai contoh, semua pemilih dapat menilai kinerja aparat pemerintah daerah dengan membandingkan pelayanan publik yang dihasilkan daerahnya dengan yang dihasilkan daerah tetangganya, hal ini disebut juga “*yardstick competition*” (Besley dan Case, 1995; dalam Roy 2013).

Alternatif lain, berbagai bentuk persaingan pajak dapat memberikan suatu kendala bagi aktivitas *rent-seeking* (Edwards and Keen, 1996 ; dalam Roy, 2013). Jenis-jenis kendala bagi pengambil keputusan pelayanan public lokal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dari aparat pemerintah daerah, sehingga membuat desentralisasi fiskal lebih diinginkan jika dibandingkan dengan sentralisasi.

C. Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Prinsip Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman Negara-negara lain dalam melakukan desentralisasi. Sebagaimana diungkapkan Ter-minassian (1997) bahwa banyak Negara di dunia melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik yang

menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi. Lebih lanjut Ter-minassian menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas para politikus kepada konstituennya, serta untuk menjamin adanya keterkaitan antara kuantitas, kualitas, dan komposisi penyediaan layanan publik dengan kebutuhan penerima manfaat layanan tersebut. Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2009) dalam Roy (2013):

- a) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
- c) Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional.
- d) Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
- e) Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Tidak jauh berbeda, (Siddik, 2009) dalam Roy (2013) menjelaskan bahwa tujuan umum program desentralisasi fiskal di Indonesai adalah untuk; (1) membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah; (2) memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan memobilisasi pendapatan daerah dan kemudian nasional; (3) meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan mengembangkan partisipasi

konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; (4) mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah, dan (5) memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

Dalam tataran kebijakan yang lebih aplikatif, desentralisasi fiskal tersebut diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka memenuhi asas desentralisasi, pemberian dana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya. Di banyak Negara yang menganut desentralisasi, kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat lokal dan memberikan jaminan kepada rakyat bahwa pelayanan publik akan semakin membaik dan rakyat akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan (Bahl and Linn, 1992) dalam Roy,J (2013).

Mekanisme kebijakan transfer ke daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Secara nominal jenis transfer ke daerah dalam bentuk ini tercatat sebagai komponen terbesar dari dana transfer ke daerah (Mardiasmo, 2009). Lebih lanjut mardiasmo menjelaskan bahwa beranjak dari konsep dasar dan implementasinya dalam desentralisasi fiskal di Indonesia, besarnya transfer dana di daerah seharusnya

memiliki korelasi yang positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu pada anggaran belanja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja dapat diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi (jenis belanja). Pengklasifikasian belanja tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penganggaran dan pelaporan. Oleh karena itu, klasifikasi yang dapat memenuhi fungsi anggaran dan pelaporan harus diformulasikan sebagai berikut:

- a. klasifikasi menurut fungsi, digunakan untuk analisis historis dan formulasi kebijakan;
- b. klasifikasi organisasi, untuk keperluan akuntabilitas;
- c. klasifikasi menurut ekonomi, untuk tujuan statistik dan obyek (jenis belanja), ketaatan (compliance), pengendalian (control), dan analisis ekonomi.

D. Ketimpangan (*disparity*) Antar Daerah

1. Definisi Ketimpangan (*Disparity*)

Perbedaan kemajuan antar wilayah yang berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh yang analog dengan kesenjangan sehingga yang timbul adalah ketidakmerataan sehingga muncul pendapat dan studi-studi empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada posisi yang dikotomis dalam hal ini (Kuznet, 1955) mengemukakan suatu hipotesis yang di kenal dengan sebutan *U Hypothesis*, hipotesa ini dihasilkan lewat kajian empiris terhadap pola pertumbuhan ekonomi terhadap *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan.

Seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi maka setelah mencapai tahap tertentu *trade off* tersebut akan menghilang diganti dengan hubungan kolerasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan yang disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sector modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja.

Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan di sektor modern lebih cepat dibandingkan sektor tradisional. Berdasarkan tingkat kemajuannya wilayah-wilayah dalam suatu negara dapat di kelompokkan sebagai berikut :

1. Wilayah terlalu maju terutama kota-kota besar dimana terdapat batas pertumbuhan atau polarisasi, umpamanya dalam menghadapi masalah *diseconomies of scale* yang menyebabkan masalah manajemen, kenaikan biaya produksi, kenaikan biaya fasilitas pelayanan umum, kenaikan gaji dan upah, kenaikan harga bahan baku energi, peningkatan ongkos sosial.
2. Wilayah netral di cirikan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi, tidak ada kesesakan dan tekanan ongkos sosial dan merupakan kota satelit bagi wilayah yang terlalu padat.
3. Wilayah sedang merupakan wilayah dengan ciri-ciri campuran pola distribusi pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif baik yang merupakan gambaran kombinasi antara daerah maju dan kurang maju dimana terdapat juga pengangguran dan kelompok masyarakat miskin.

4. Wilayah kurang berkembang atau kurang maju yang merupakan wilayah dengan tingkat pertumbuhan jauh di bawah tingkat pertumbuhan nasional dan tidak ada tanda-tanda untuk dapat mengejar pertumbuhan dan pembangunan nasional seperti daerah-daerah konsentrasi industri yang sudah mundur.
5. Wilayah tidak berkembang merupakan wilayah tidak maju atau wilayah miskin dimana industri modern tidak pernah dapat berkembang dalam berbagai skala umumnya ditandai dengan daerah pertanian dengan usaha tani subsisten dan kecil, berpenduduk jarang dan tersebar dan tidak terdapat kota atau konsentrasi pemukiman yang relatif besar.

2. Teori Ketimpangan (*Disparity*)

Berikut ini akan dijelaskan dua teori ketimpangan wilayah, yaitu *Trickling Down Effect* dan *Polarization Effect*; serta *Backwash-Spread Effect*.

a) *Trickling Down Effect* dan *Polarization Effect*

Hirschman, Albert O. (1970) dalam tulisannya yang berjudul *Interregional and International Transmission of Economic Growth* membedakan daerah di suatu negara menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (*trickling down effect*). Sedangkan perbedaan antara kedua daerah tersebut melebar berarti terjadi imbas yang kurang baik, atau terjadi proses pengkutuban (*polarization Effect*).

b) *Spread Effect* dan *Backwash Effect*

Jinghan (1990) menyatakan bahwa ketimpangan regional dalam suatu negara berakar pada dasar nonekonomi. Ketimpangan berkaitan erat dengan system

kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif inilah yang mendorong pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki “harapan laba tinggi”, sementara wilayah-wilayah yang lain menjadi terlantar.

Myrdal menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya melalui dampak baik (*backwas effect*) dan dampak sebar (*spread effect*). *Backwash effect* terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (mis: wilayah A) mengakibatkan terjadinya perpindahan sumber daya (tenaga kerja, modal, dll) dari wilayah di sekitarnya (mis: wilayah B). sehingga wilayah A (yang awalnya merupakan wilayah yang lebih maju dibandingkan wilayah B), akan semakin maju dan wilayah B akan semakin tertinggal.

Spread effect terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (mis: wilayah A) mengakibatkan pertumbuhan wilayah disekitarnya (mis: wilayah B), yang memproduksi bahan mentah untuk keperluan industri yang sedang tumbuh di sentra-sentra tersebut, dan sentra-sentra yang mempunyai industri barang-barang konsumsi akan terangsang. Selanjutnya Myrdal menyimpulkan ketimpangan wilayah disebabkan oleh lemahnya dampak sebar (*spread effect*) dan kuatnya dampak balik (*backwash effect*).

3. Pengukuran Ketimpangan (*Disparity*)

Banyak perhatian telah diberikan terhadap bagaimana distribusi pendapatan berubah dalam masa pembangunan). Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Beberapa ukuran yang sering digunakan antara lain adalah:

a) Indeks Williamson

Indeks Williamson mengukur dispersi tingkat pendapatan per kapita daerah relatif terhadap rata-rata pendapatan nasional. Rumusan Indeks Williamson tersebut adalah (Syafrizal,2012):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

- Y_i = PDRB per kapita di Kabupaten/kota i
- Y =PDRB per kapita rata-rata Provinsi
- f_i = Jumlah Penduduk di Kabupaten/kota
- n = Jumlah Penduduk Provinsi

b) Indeks Entropi Theil

Indeks entropi theil dapat digunakan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi theil juga dapat menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama kurun waktu tertentu; sedang yang kedua juga penting untuk mengkaji gambaran yang lebih rinci tentang ketimpangan spasial. Sebagai contoh ketimpangan antar wilayah dalam suatu Negara. (Kuncoro, 2004). Rumus dari Indeks Entropi Theil adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2004):

$$I = \sum \left(\frac{y_j}{Y} \right) \times \log \left[\frac{\left(\frac{y_j}{Y} \right)}{\left(\frac{x_j}{X} \right)} \right]$$

Keterangan :

- $I(y)$ = Indeks Entropi Theil
 y_j = PDRB per kapita kabupaten/kota j
 Y = rata-rata PDRB per kapita provinsi j
 x_j = jumlah penduduk kabupaten/kota j
 X = jumlah penduduk provinsi

c) Indeks Jaime Bonet

Indeks ini merupakan pengukuran yang dilakukan oleh Bonet (2006) untuk mengukur ketimpangan sebagai variabel dependen dalam penelitiannya untuk menghitung pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan di Negara Kolumbia. Indeks Bonet pada provinsi untuk periode t ($IB_{i,t}$) dirumuskan sebagai berikut (Siagian,2010) :

$$IB_{i,t} = \left| \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{NAL,t}} - 1 \right|$$

Keterangan :

- IB = ketimpangan provinsi i pada tahun t
 $PCGDP_{i,t}$ = PDRB per kapita kabupaten/kota i, pada tahun t
 $PCGDP_{NAL,t}$ = PDRB per kapita provinsi pada tahun t

Rumus tersebut menyatakan bahwa kesetaraan sempurna terjadi pada saat PDRB per kapita kabupaten/kota sama dengan PDRB per kapita provinsi. Oleh karena itu, ketimpangan wilayah diukur dari selisih antara PDRB per kapita relative (wilayah terhadap nasional) dan 1 (kondisi kesetaraan sempurna), yang diabsolutkan.

E. Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan

Gunar Mirdal dalam Roy (2013) mengemukakan bahwa ketimpangan antar daerah dapat disebabkan sebagai akibat dari pengaruh *backwash effect* yang lebih besar dari *spread effect*. Perpindahan tenaga kerja atau migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya karena perbedaan pelayanan publik ataupun karena perbedaan infrastruktur (daerah kaya dan daerah miskin) yang diberikan oleh pemerintah daerah menimbulkan *backwash effect*. Sementara jika terjadi peningkatan *market share* sebagai akibat dari peningkatan produksi sektor tertentu yang akan mendorong penggunaan teknologi yang lebih maju menyebabkan terjadinya *spread effect*.

Selanjutnya pendapat ini didukung oleh Hirschman (1970) bahwa terjadinya *trickle down effect* dari daerah *core* ke daerah *periphery* yang lebih kecil dari pada *polarization effect* akan menyebabkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan antar daerah. Prud'homme (1995) menyatakan bahwa dengan membayangkan terjadinya peningkatan ketimpangan antar daerah dalam kompetisi antar daerah disebabkan karena daerah kaya dan miskin mempunyai kemampuan perpajakan yang berbeda, sehingga rata-rata beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat di daerah miskin akan cenderung lebih besar dibanding dengan daerah yang lebih kaya. Hal ini akan menghasilkan lingkaran setan dimana yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Dengan argumentasi seperti tersebut diatas, maka kompetisi fiskal seperti itu harus dihilangkan dengan menerapkan sistem sentralisasi melalui sistem bantuan dari pemerintah pusat. MacKinnon (1995) dan Qian dan Weingast (1997) menjelaskan desentralisasi sebagai suatu alat komitmen dan menyatakan bahwa ketimpangan regional

berkaitan dengan efisiensi pelayanan publik. mereka mengarahkan perhatian pada dampak kebijakan yang bersifat insentif dari desentralisasi pada tingkat pemerintah daerah. Dengan anggaran yang terdesentralisasi kebijakan menutupi seluruh pembiayaan daerah yang kurang mampu melalui pembagian sumberdaya dari pemerintah pusat mungkin relatif melemahkan anggaran dan mengganggu insentif daerah untuk keluar dari daerah yang miskin. Sehingga sebenarnya desentralisasi memungkinkan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Disisi lain, Williamsom (dalam Roy, 2013) menyatakan bahwa disparitas antar wilayah akan cenderung semakin membesar khususnya pada tahapan awal terjadinya suatu proses pembangunan. lebih jauh dikatakan bahwa secara umum beberapa faktor diduga sebagai penyebab terjadinya peningkatan disparitas antar wilayah, yaitu:

- 1) Migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki keahlian dari daerah kurang berkembang ke daerah yang telah berkembang karena disana mereka memperoleh upah/gaji yang lebih besar.
- 2) Investasi cenderung dilakukan didaerah yang telah berkembang karena faktor pasar dimana keuntungannya relatif besar, demikian pula resiko kerugian pengaliran modal dari daerah miskin menuju daerah yang berkembang.
- 3) Kebijakan pemerintah, disadari maupun tanpa disadari cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sara dan prasarana kegiatan sosial ekonomi didaerah yang telah berkembang karena adanya kebutuhan yang lebih besar.

- 4) Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan yang didominasi oleh industri-industri di daerah yang telah berkembang.
- 5) Tidak adanya kaitan antara pasar daerah (*regional market*) telah menyebabkan rintangan untuk pemencaran dan pelipatgandaan pendapatan.

Toatubun (2011) dalam Roy (2013) yang melakukan penelitian tentang determinan disparitas pembangunan di Provinsi Maluku, menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan di Provinsi Maluku. Senada dengan Toatubun, Hartono (2009) dalam Roy (2013) yang meneliti tentang ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa alokasi dana pembangunan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan menurut Zasriati (2011) yang melakukan penelitian tentang pengaruh alokasi dana perimbangan terhadap ketimpangan ekonomi regional di Jambi, menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi regional sedangkan Dana bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi regional di Provinsi Jambi. Berdasarkan ulasan teori, empiris dan pendepatan yang telah dipaparkan diatas. maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong peningkatan pencapaian efisiensi dalam pelayanan dan produksi barang publik. Namun penerapan desentralisasi fiskal pada ruang yang berbeda, apakah karena perbedaan karakteristik ekonomi dan kelembagaan akan menghasilkan pengaruh yang berbeda. Faktor selain desentralisasi fiskal sangat berpengaruh dalam pencapaian efisiensi pelayanan

public maupun pengaruhnya terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomin dan perbaikan ketimpangan.

F. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Disparitas

Pendapatan

Prud'homme (1995) mengemukakan pendapatnya tentang pengaruh desentralisasi fiskal, khususnya desentralisasi pendapatan, terhadap disparitas pendapatan regional. Menurutnya wilayah-wilayah yang lebih kaya akan memiliki *tax bases* yang lebih besar, dan oleh karenanya akan mampu untuk mengumpulkan pajak yang lebih banyak. Dengan penghasilan pajak yang lebih besar maka daerah-daerah tersebut akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih dibandingkan daerah lain yang lebih miskin. Hal ini mengakibatkan dunia usaha maupun rumah tangga lebih menyukai untuk berada di daerah-daerah tersebut yang mengakibatkan *tax base* yang telah ada menjadi lebih besar lagi daripada sebelumnya. Dengan kondisi demikian maka akan terjadi disparitas pendapatan regional. Namun demikian, bertentangan dengan pendapat tersebut, berbagai hasil penelitian terkini yang antara lain oleh Gil, Pascud, dan Rapun (2002), Widhiyanto (2008), serta Akai dan Sakata (2005) menunjukkan bahwa PAD/*Local Revenue* justru berkorelasi negatif secara signifikan terhadap disparitas pendapatan regional yang artinya bahwa PAD justru akan dapat menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional. Dengan demikian tampak bahwa terdapat dua pendapat tentang dampak variabel PAD terhadap disparitas pendapatan regional, di mana pendapat pertama menyatakan PAD akan meningkatkan disparitas pendapatan regional sementara pendapat lainnya

menyatakan sebaliknya bahwa PAD justru akan menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional.

G. Hubungan Dana Perimbangan dengan Disparitas Pendapatan

Menurut Sjafrizal (2008) pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi juga dapat untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan cara menambah alokasi dana kepada masing-masing daerah dalam bentuk *block grant* yang berupa dana perimbangan. Dengan demikian persamaan yang digunakan adalah dalam bentuk linier. Zasriati (2011) mengatakan dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh negative atau menurun secara signifikan terhadap ketimpangan (*disparity*). Sedangkan dana bagi hasil berpengaruh positif atau mendorong secara signifikan.

Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan tampaknya perlu lebih diperhatikan di masa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional.

H. Tinjauan Empiris

Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan referensi peneliti untuk membandingkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian :

Tabel 3 Tinjauan Empiris

No.	Judul / Penulis	Variabel	Kesimpulan
1	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional Di Indonesia Tahun 2001-2008/ Muhammad Andry Nurman (2013)	Variabel yang digunakan sebagai proxy dari desentralisasi fiskal adalah: belanja langsung (desentralisasi pengeluaran), serta PAD, DAU dan Dana Bagi Hasil (desentralisasi penerimaan)	belanja langsung telah mampu untuk mengurangi disparitas pendapatan regional, sebaliknya DAU justru mengakibatkan meningkatnya disparitas pendapatan regional
2.	<i>Fiscal Desentralization And Indonesia Regional Income Disparity (1994-2004)</i> /Imam Widhiyanto (2008)	Variabel yang digunakan adalah PDRB, Pengeluaran Pemerintah, PAD dan Dana Perimbangan	Desentralisasi fiskal di Indonesia meningkatkan jumlah pertumbuhan ekonomi dan menurunkan disparitas pendapatan daerah selama periode pengamatan.
3.	Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah Di Indonesia / Joko Waluyo (2007)	Variabel target ditentukan sebagai berikut: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA), sehingga dispesifikasikan sebagai variabel eksogen. Sedangkan sebagai variabel targetnya adalah Pertumbuhan Ekonomi Daerah (DPDRB) dan PDRB perkapita setiap propinsi di Indonesia (PDRBCAP).	dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme transmisi, yaitu: 1) Melalui mekanisme pemberian dana bagi hasil pajak (DBHP), dan bagi hasil sumber daya alam (DBHSDA) yang berkorelasi negatif, 2) Melalui mekanisme pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) yang efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah.

4.	<p><i>Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance</i> /Andreas P. Kyriacou, Leonel Muinelo-Gallo dan Orriol Roca-Sagales (2013)</p>	<p>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: PDB rill, investasi public dan swasta, perdagangan dan belanja public.</p>	<p>Bahwa desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi suatu daerah dalam pengaturan kualitas pemerintah yang lebih baik dan desentralisasi fiskal juga dapat mengurangi perbedaan pendapatan didaerah. Akan tetapi potensi ini tidak dapat direalisasikan karena masalah tata kelola terkait dengan otoritas subnasional. Sehingga hal ini yang mengarah kedisparitas regional yang lebih luas di negara-negara dengan tata kelola yang buruk.</p>
5.	<p><i>Fiscal Decentralization and Regional Disparity : A Panel Data Approach for OECD Countries</i> /Christian Lessmann (2006)</p>	<p>Variabel yang digunakan sebagai berikut: Jumlah penduduk, Jumlah urbanisasi, tingkat pengangguran, transfer pemerintah pusat, pendapatan dari sector pertanian dan retribusi social.</p>	<p>dengan derajat yang semakin tinggi dari desentralisasi maka semakin berhubungan kuat dengan rendahnya ketimpangan wilayah. Di mana wilayah yang miskin tidak akan dirugikan dengan adanya desentralisasi, begitupun sebaliknya</p>
6.	<p><i>Fiscal decentralization and regional disparities: evidence from several European Union countries</i> /Roberto Ezcurra, Pedro Pascual (2008)</p>	<p>Variabel yang digunakan sebagai berikut: GDP perkapita, populasi penduduk dan total belanja</p>	<p>desentralisasi fiskal berhubungan negatif dengan tingkat ketimpangan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di negara-negara Uni Eropa.</p>

7.	<p>Analisis ketimpangan pembangunan ; Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011 /Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo (2013)</p>	<p>Variabel PDRB, PAD, DAU, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan</p>	<p>menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Jawa Timur masih rendah. Hipotesis Kuznets juga berlaku di Provinsi ini. PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan untuk PDRB dan DAU tidak diketahui pengaruhnya dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam uji asumsi klasik.</p>
8.	<p>Analisis Hubungan Dana Perimbangan dan Ketimpangan Pembangunan Provinsi Aceh /Saifunnizar(2013)</p>	<p>Variabel terikat ketimpangan pembangunan (indeks Williamson) dan variable bebas dana perimbangan</p>	<p>Dana perimbangan berhubungan negative dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di provinsi aceh.</p>

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder dengan jenis data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross section* dari Kabupaten/kota Provinsi Lampung yang dimulai dari Tahun 2001 sampai Tahun 2014. Data ini bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini serta media informasi internet. Selain itu digunakan pula buku-buku bacaan sebagai referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sesuai dengan data Kabupaten/Kota yang telah memiliki APBD. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 10 kabupaten/kota dengan pemilihan sampel melalui *purposive sampling* dengan kriteria Kabupaten/Kota yang tidak mengalami pemekaran selama periode tahun 2001-2014 dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal selama lebih dari 10 tahun.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian “Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2001 - 2014” adalah Variabel Terikat adalah Disparitas Pendapatan Kabupaten/kota Provinsi Lampung dan variable Bebas terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan. Batasan atau definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal adalah seberapa besar ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data APBD Kabupaten/kota Provinsi Lampung. Dimana data tersebut diolah kembali dengan menggunakan perhitungan perbandingan total penerimaan daerah dengan pendapatan asli daerah yang disebut dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, Dimana dirumuskan sebagai berikut :

$$R_{Fi,t} = \frac{PAD_{i,t}}{TPD_{i,t}} \times 100 \%$$

Dimana :

$R_{Fi,t}$ = Derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota i, pada tahun t

$PAD_{i,t}$ = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota i, pada tahun t

$TPD_{i,t}$ = Total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota i, pada tahun t

Data Diperoleh dari situs <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> selama periode 2001 sampai dengan 2014

3. Dana perimbangan adalah dana yang diberikan oleh pusat dan diberikan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berupa DAU,DAK,DBH. Data Diperoleh dari situs <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> selama periode 2001 sampai dengan 2014
4. Disparitas Pendapatan adalah kesenjangan pendapatan antar daerah yang disebabkan oleh berbedanya jumlah penerimaan yang di hasilkan oleh daerah tersebut. Data yang digunakan adalah PDRB Perkapita Kabupaten/kota Provinsi Lampung dan PDRB Perkapita Provinsi Lampung yang digunakan untuk menghitung jumlah disparitas pendapatan dengan menggunakan indeks ketimpangan Jaime Bonet. Data diperoleh dari situs <http://www.bps.go.id> selama periode 2001 sampai dengan 2014

D. Metode Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis asosiatif dengan menggunakan teori-teori dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa variabel independen secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *cross-section* dan *time series*.¹

¹ Dapat dilihat Widarjono, Agus (2013). *Ekonometrika*. Yogyakarta :UPP STIM YKPN. Hal.353-354

E. Model Analisis

1. Model Analisis Ketimpangan (*disparity*) antar Daerah

Ketimpangan Pembangunan antar kabupaten/kota yang terjadi di Lampung dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan Jaime Bonet. Indeks ini merupakan pengukuran yang dilakukan oleh Bonet (2006) untuk mengukur ketimpangan sebagai variabel dependen dalam penelitiannya untuk menghitung pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan di Negara Kolumbia. Indeks Bonet pada provinsi untuk periode t ($IB_{i,t}$) dirumuskan sebagai berikut (Siagian,2010) :

$$IB_{i,t} = \left| \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{NAL,t}} - 1 \right|$$

Keterangan :

IB = ketimpangan wilayah i pada tahun t

PCGDP_{i,t} = PDRB per kapita kabupaten/kota i, pada tahun t

PCGDP_{NAL,t} = PDRB per kapita provinsi pada tahun t

Hasil perhitungan dengan metode indeks Jaime Bonet diatas jika nilai indeks > 1, maka terjadi ketimpangan yang maksimum, jika nilai indeks mendekati 0 maka terjadi ketimpangan yang rendah.

2. Model Analisis Ekonomterik

Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap ketimpangan pembangunan di Lampung periode 2001-2014 dengan menggunakan model analisis adalah :

$$IB_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \mu_{it}$$

Dimana :

IB	= Ketimpangan Pendapatan		= Konstanta
PAD	= Pendapat Asli Daerah	1- 4	= Koefisien Regresi
DAU	= Dana Alokasi Umum	μ	= Variabel Gangguan
DAK	= Dana Alokasi Khusus	i	= Kabupaten/Kota
DAU	= Dana Bagi Hasil	t	= Tahun

F. Prosedur Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak *Eviews 6.1* dan *Mc.Excel 2007*. Langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi :

1. Analisis Model Regresi

Permodelan dalam menggunakan teknik regresi panel data dapat menggunakan tiga pendekatan alternatif metode dalam pengolahannya. Pendekatan – pendekatan tersebut ialah

a. *Pooled Least Square (PLS)/ Common Effect Model (CEM)*

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sederhana. Pendekatan ini menggabungkan seluruh data time series dan cross section. Dalam CEM, parameter penelitian diestimasi menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Model data panel dalam pendekatan ini adalah :

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Pendekatan ini merupakan pendekatan regresi dengan menggunakan *dummy variable* sebagai variabel bebas. FEM memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted variable* yang dapat membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross-section*.

c. *Random Effect Model (REM)*

Dengan pendekatan ini, perbedaan antar individu dan atau waktu diakomodasi lewat *error*. Pada REM, *error* diasumsikan *random* dan diestimasi dengan metode *Generalized Least Square (GLS)*. REM juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross-section*.

Model data panel dalam pendekatan ini adalah

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} + \mu_{it}$$

2. Pemilihan Model Data Panel

Untuk melakukan pemilihan model yang akan digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian terhadap masing-masing model.

Penggunaan metode *fixed effects* dengan metode *pooled least square* dapat diuji dengan *F-Test*, sedangkan *The Hausman specification test* membandingkan antara metode *fixed effect* dan metode *random effect*. Selanjutnya, metode *random effects* dengan metode *pooled least square* diuji dengan *Lagrange Multiplier (LM) test*.

a. *F-Test* adalah pengujian untuk memilih model yang digunakan apakah *pooled least square* atau *fixed effect*.

$$F = \frac{R_{FE}^2 - R_{CC}^2 / N - 1}{(1 - R_{FE}^2) / NT - N - K} \quad F(N - 1, NT - N - K)$$

Dimana,

R_{2FE} = koefisien determinasi untuk model *fixed effect (LSDV)*

R_{2CC} = koefisien determinasi untuk model *common constant (OLS)*

N = jumlah sampel *cross section*

T = jumlah sampel *time series*

K = total jumlah koefisien regresi (termasuk konstanta)

Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel} (n-1, nt-n-k)$ maka tolak H_0 , OLS model *invalid* sehingga LSDV atau FEM adalah *valid*. Hipotesis dari pengujian tersebut adalah sebagai berikut :

H_0 : metode *pooled least square*

H_1 : metode *fixed effects*

b. Hausman test adalah pengujian untuk memilih antara penggunaan *random effects* dan *fixed effects* maka digunakan pertimbangan statistik *Chi-Square* (Gujarati, 2003). *Hausman test* menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : metode *random effects*

H_1 : metode *fixed effects*

Untuk tingkat 5%, maka hipotesis nol (*null hypothesis*) akan ditolak jika *probability cross-section random* pada pengujian ini lebih kecil dari 5%. Jika hipotesis nol (*null hypothesis*) ditolak maka pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan efek tetap (*fixed effect*), tetapi jika gagal menolak hipotesis nol (*null hypothesis*) maka pendekatan efek acak (*randomeffect*) digunakan.

c. The Breusch-Pagan LM Test adalah pengujian untuk memilih antara *random effects* dan *pooled least square* dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \sigma_i^2 = \sigma^2$ (struktur homoskedastik)

$H_1: \sigma_i^2 \neq \sigma^2$ (struktur heteroskedastik)

Dengan statistik uji :

$$LM = \frac{T}{2} \sum_{i=1}^N \left[\frac{\hat{\sigma}_i^2}{\hat{\sigma}^2} - 1 \right]^2$$

Keterangan:

T : jumlah unit *time series*

N : jumlah unit *cross-section*

$\hat{\sigma}_i^2$: varians residual persamaan ke-i

$\hat{\sigma}^2$: varians residual persamaan *system*

Jika $\chi^2_{hit} > \chi^2_{(N-1; \alpha)}$ maka H_0 ditolak dan berarti bahwa model FEM memiliki struktur heteroskedastisitas sehingga harus diestimasi dengan metode *weighted:cross-section weight*.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis sebagai uji yang bertujuan untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua koefisien regresi harus diuji. Terdapat tiga jenis pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat dilakukan, yaitu dengan uji-F, uji-t, dan uji *goodness of fit* (R^2).

a. Uji-F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji-F menguji model secara keseluruhan untuk melihat apakah semua koefisien regresi dalam model berbeda dengan 0 (model diterima) atau sama dengan 0 (model tidak diterima). Uji-F dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan dapat ditarik kesimpulan bahwa paling tidak ada satu *slope* regresi yang signifikan secara statistik. Selain dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} , terdapat cara yang lebih mudah untuk uji-F yaitu dengan membandingkan F_{hitung} dengan *p-value*

yang dihasilkan oleh tabel output aplikasi statistika. Jika nilai $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

b. Uji-t (Uji Signifikansi Individual)

Uji-t bertujuan untuk menghitung koefisien regresi secara individu. Dengan pengujian ini, dapat diketahui apakah suatu variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel terikat atau tidak. Cara melakukan uji-t mirip dengan uji-F. Uji-t dapat dilakukan dengan membandingkan thitung dengan t tabel. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas tersebut memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan variabel terikat.

c. Uji Goodness of Fit (R^2)

Goodness of fit atau koefisien determinasi (R^2) adalah suatu ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Nilai koefisien determinasi atau R^2 menggambarkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Apabila nilai $R^2 = 0$, maka berarti bahwa variasi dari variabel terikat sama sekali tidak dapat diterangkan oleh variabel bebas. Sebaliknya bila nilai $R^2 = 1$, maka variasi dari variabel terikat dapat dengan sempurna diterangkan oleh variabel bebas. Dalam kondisi tersebut, semua titik pengamatan akan berada tepat pada garis regresi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil estimasi menunjukan bahwa variable Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung memiliki pengaruh positif terhadap Disparitas Pendapatan di provinsi Lampung dan pengaruhnya signifikan (nyata) padatingkat kepercayaan 95 persen. Dengan demikian , PAD yang semakin besar dan merata akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi namun juga akan meningkat tingkat ketimpangan pendapatan di provinsi Lampung.
2. Untuk variabel Dana Perimbangan di provinsiLampung, memiliki pengaruh negatif terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Lampung dan memberikan pengaruh signifikan (nyata) pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi dana transfer dari pusat kedaerah mampu menekan tingkat disparitas pendapatan antar wilayah. Dengan adanya transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka daerah yang lemah akan kekuatan fiskalnya mampu dibantu untuk menutupi celah pendanaan di daerahnya

1. Secara bersama-sama variabel rasio pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan kabupaten/kota di provinsi Lampung. Selain itu, Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien intersep disparitas pendapatandi provinsi Lampung memiliki nilai berbeda. Dari koefisien intersep masing-masing daerah, kabupaten Lampung Barat memiliki nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerahlain. Sedangkan, kabupaten TulangBawang memiliki nilai koefisien intersep yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan, maka saran yang diberikan adalah:

1. Untuk masing-masing pemerintahan daerah di provinsi lampung harus mengoptimalkan pembangunan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mampu menekan tingkat disparitas antar wilayah.Selain itu, perlunya upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan merubah atau menambah cakupan penelitian, seperti jumlah sampel yang digunakan, sehingga melengkapi hasil penelitian ini. Serta memasukkan variabel lain yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap disparitas pendapatan baik di sisi penerimaan maupun di sisi pengeluaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, and Sakata. (2005). *Fiscal decentralization, commitment and regional inequality: Evidence from state level cross-Sectional data for The United States*. Osaka: Osaka International University.
- Bahl, Roy W. dan Johannes Linn, (1992), *Urban Public Finance in Developing Countries*, New York Oxford University Press.
- Bonet, J. (2006). *Fiscal decentralization and regional income disparities: Evidence from the Columbian experience*. *The Annals of Regional Science*, 40, 661-676.
- Dillinger, William (1994), “*Decentralization and Its Implication for Urban Service Delivery*,” *Urban Management Program Discussion Paper 16*, Washington DC: WorldBank, Transportation, Water and Urban Development Department, UrbanDevelopment Division.
- Dwi Sundi Marliyanti.(2013). Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar.*Jurnal.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.Denpasar.
- Ebel, Robert D danSeidarYilmaz.(2002). *Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview*. *World Bank Institute*.Available: <http://www.worldbank.org>
- Gil, Pascud, andRapun.(2002). *Decentralization and regional economic disparities*.Pamplona:Universidad Pública de Navarra.
- Gujarati, N Damodar ,(2004): *Basic Econometrics, Fourth Edition, The McGraw-Hill Companies*.
- Hartono, Budiantoro. (2008). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang

- Hidayat, Syarif, (2005). *Too Much Too Soon ; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hirschman, Alberto. (1970). *Teori dan Praktek Otonomi Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Jhingan, ML., (2004). *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jin, Jing dan Heng-Fu Zou. (2000). *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. World Bank Working Paper Series. Working Paper Series 1452. Available: <http://www.worldbank.org>
- Khusaini, Mohammad, (2006). *Ekonomi Publik -Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang, BPFE Unibraw.
- Kuncoro, Mudrajat, (2006). *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. (2009). *Ekonomika Indonesia; Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004) *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Kyriacou, Gallo and Sagales. (2013). *Fiscal Decentralization and Regional Disparities: The Importance of Good Governance*. UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (UDELAR)-Facultad De Ciencias Económicas Y De Administración- Instituto De Economía (FCEYA) URUGUAY
- Lessman, Christian. (2006). *Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries. Germany : Ifo Working Paper No. 25*
- Lestari, Dayu. (2012). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Aksesibilitas Pendidikan Di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode Sebelum Dan Setelah Desentralisasi Fiskal)*. Skripsi Universitas Indonesia
- Litvack, Jennie, (1999). *Decentralization*, Washington, DC, World Bank.
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mawhood P. (ed), (1987). *Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa*. Chicester: Jhon Wiley & Sons.

- Nazara, Suahasil. Nurkholis.(2007). “Ukuran Optimal Pemerintah Daerah Di Indonesia: Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Era Desentralisasi”. *Jurnal Ekonomidan Pembangunan Indonesia* Volume VII, No. 2, Januari 2007, halaman 129-157.
- Nurhuda, Rama. M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo. (2013). Analisis Ketimpangan pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011) *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, Nomor 4, Hal. 110-119
- Nurman, Andry M. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional Di Indonesia Tahun 2001-2008. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2013, 1-20
- Oates, W. E. (1977). An Economist’s Perspective on Fiscal Federalism, in: W. E. Oates (ed.), *The Political Economy of Fiscal Federalism*, Lexington, Toronto, 1977.
- Oates, Wallace (2001), “*Fiscal Competition and European Union: Contrasting perspectives*”, *Regional Science and Urban Economic*, 31, Elsevier, Amsterdam, pp. 133-145.
- Paddu, Abdul Hamid, (2010). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Indonesia, Disertasi, Makassar.
- Phillips, Kerk and Gray Woller (1997), “*Fiscal Decentralization and ldc Economic Growth: An Empirical Investigation*”, *Journal of Development Studies*, 34 (4), Routledge, London, pp. 139-148.
- Prud’homme, Remy, (1995). On The Danger of Decentralization, Washington DC, The World Bank, Policy Research Working Paper, 1252.
- Rio, Juliansyah, (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Di Kalimantan Timur. *Desrtasi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rodríguez-Pose, A, and Ezcurra, R. (2009). *Does decentralization matter for regional disparities? A cross country analysis*. Madrid: IMDEA
- Sacchi, Salotti. (2011). *Income inequality, regional disparities, and fiscal decentralization in industrialized countries*. Faculty of Economics and Management, University of Barcelona.

- Saifunnizar, (2013). “Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh”. *Skripsi*, Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.
- Sasana, Hadi. (2009.) Analisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah, dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di kab/kota provinsi Jawa Tengah dalam era desentralisasi fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Hal. 50 – 69. Vol. 16, No.1
- Siddik, Machfud, (2009). “Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999-2004” Dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, *Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Simanjuntak, Robert. (2001). *DAU dan Pemerataan Kemampuan Fiskal*. Kompas. Jakarta.
- Slinko, Irina. (2002). *Fiscal Decentralization on The Budget Revenue Inequity among Municipalities and Growth Russian Regions*. Available: <http://www.econpapers.repec.org>
- Syafrizal. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Padang: Badouse Media.
- Syafizal (2012). *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ter-Minassian, Teresa, (1997), *Fiscal Federalism in Theory and Practice*, Washington, International Monetary Fund.
- Toatubun, Johanis Paulus. (2011). Analisis Determinan Disparitas Pembangunan di Provinsi Maluku. *Tesis*. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Widhiyanto, I. (2008). Fiscal decentralization and Indonesia regional income disparity, *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1)
- Waluyo, J. (2007). Dampak desentralisasifiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah Di Indonesia, Depok :Parallel Session IA : Fiscal Decentralization
- Widarjono, Agus (2013). *Ekonometrika*. Yogyakarta :UPP STIM YKPN
- Yilmaz, S. (2000), *The impact of fiscal decentralization on macroeconomic performance*, in N. T. Association, ed., *.Proceedings of the 92nd Annual Conference on Taxation 1999.*, Washington D. C., pp. 251-260
- Zasriati, Masrida. (2011), Analisis PengaruhAlokasi Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Ekonomi Regional Provinsi Jambi. Skripsi
- Zhang, Tao and Heng Zou (1998), “*Fiscal decentralization, public spending and economic growth in China*”, *Journal of Public Economic*, 67, Elsevier, Amsterdam, pp. 221-240.

Website :

<https://bps.go.id>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>